



RAWA TARUNG

PERTARUHAN DI RAWA GAMBUT TRIPA

RAWA TARUNG
PERTARUHAN DI RAWA GAMBUT TRIPA

PERPUSTAKAN NASIONAL RI
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

RAWA TARUNG
PERTARUHAN DI RAWA GAMBUT TRIPA

Penulis
Agus Prijono

Editor
Ali Sofiawan

Tata Letak
Aries "Bachil" Bachtiar

Foto Sampul
Graham Usher
Yayasan Ekosistem Lestari

Terbit 2016
ISBN 978-979-3598-45-1

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan oleh:



Jl. Bangka VIII No.3B Pela Mampang
Jakarta 12720 - INDONESIA
Tel: +(62-21) 7183185; 7183187
www.kehati.or.id



Tropical Forest Conservation Action Sumatera (TFCA-Sumatera) adalah program bilateral pengalihan utang untuk lingkungan (Debt for Nature-Swap) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Program ini menyediakan hibah bagi lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi untuk mengelola hutan tropis Sumatera secara berkelanjutan. Administrator program adalah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)



Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dengan dukungan TFCA-Sumatera berupaya menyelamatkan ekosistem Tripa untuk menjadi kawasan lindung di luar kawasan hutan. Untuk itu, YEL membangun database komprehensif: peta kedalaman gambut serta peta jaringan kanal sebagai dasar penetapan kawasan lindung. YEL juga membendung kanal-kanal untuk menjaga tinggi permukaan air gambut. Upaya itu diiringi dengan meningkatkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
BALADA RAWA YANG LUKA Lepas dari jeratan kebun sawit, sebagian ekosistem Tripa kini dilindungi dan direstorasi. Ini ganjalan kecil bagi lajunya penggundulan hutan gambut di pesisir barat Aceh.	2
DRAMA TRIPA Masyarakat sipil bergerak serentak menyelamatkan ekosistem tripa. Pergulatan advokasi dramatis, yang diselingi intimidasi.	28
MENYINGKAP GAMBUT TRIPA Menembus medan berat, mengendap-endap di jalur tikus, lalu mencuplik gambut, untuk menegaskan nilai ekosistem Tripa. Tanpa tindakan perlindungan, bencana ekologis menghadang di masa depan.	60
KONSERVASI DAN EKONOMI Pemberdayaan ekonomi untuk menumbuhkan relasi timbal-balik: masyarakat berdaya, lantas menjaga Tripa. Harapan untuk melahirkan kader lingkungan dan kemandirian ekonomi.	88
MENJAGA MOMENTUM Setelah kawasan lindung gambut ditetapkan, kini saatnya untuk memastikan keberlanjutan konservasi Tripa. Tak ada lagi langkah mundur.	110
PUSTAKA	125

PENGANTAR

Di pesisir barat Aceh menghampar tiga ekosistem gambut: Rawa Tripa, Kluet dan Rawa Singkil. Baik Rawa Singkil maupun Kluet telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi. Rawa Singkil menjadi suaka margasatwa dan Kluet tercakup dalam Taman Nasional Gunung Leuser.

Cerita berbeda terjadi dengan Rawa Tripa yang menjadi areal penggunaan lain (APL). Sejak 1980-an, Tripa telah tersentuh perusahaan sawit. Meski demikian, pada 1998 Tripa sebenarnya tercakup dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Artinya Tripa termasuk dalam wilayah yang dirancang untuk dikelola sesuai kaidah konservasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

Para pihak telah mengingatkan bahwa Tripa memiliki peran penting bagi lingkungan dan masyarakat. Manfaat paling kentara: saat tsunami 2004, Tripa membentengi pesisir barat Aceh dari hantaman gelombang besar.

Seiring waktu, amanah konservasi KEL dan berlimpahnya jasa ekosistem itu terlupakan. Pelan-pelan hamparan gambut di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya ini menjadi areal perkebunan. Sampai pada akhirnya, selama 2010 - 2012 terbuka momentum: para pegiat lingkungan Aceh melakukan advokasi bagi Tripa.

Riwayat ringkas itu menggambarkan pasang-surut upaya konservasi Tripa. Di tengah-tengah ekspansi sawit, para aktivis dan pakar lingkungan tak bosan-bosan mengingatkan nilai penting ekosistem Tripa.

Alhasil, upaya para pihak bermuara pada penetapan lahan bekas PT Kalista Alam sebagai Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa. Meski perlindungan hanya mencakup sebagian kecil ekosistem, namun capaian itu menegaskan Tripa masih bisa diselamatkan.

Sejarah panjang pembukaan lahan yang masif, diselingi friksi sosial, memang memunculkan keraguan: apakah Tripa masih bisa diselamatkan. Untuk itulah, sejak 2013, Tropical Forest Conservation Action-Sumatera (TFCA-Sumatera) bersama

Yayasan Ekosistem Lestari melakukan kajian mendalam tentang gambut Tripa. Penelitian itu untuk mengetahui secara rinci kedalaman gambut dan kandungan karbonnya.

Hasil kajian menunjukkan kerusakan hutan tak selalu berarti kerusakan lahan gambut. Tripa terbukti masih menyimpan cadangan karbon yang relatif besar. Bagi TFCA Sumatera, penetapan Kawasan Lindung Gambut baru langkah awal pelestarian Tripa.

Sejak awal, untuk mengimbangi upaya konservasi, YEL dan TFCA melakukan pemberdayaan ekonomi. Ini untuk mendorong warga sekitar mengembangkan ekonomi di kawasan budidaya—tidak bertumpu pada sumber daya Tripa.

Pada hakikatnya, konservasi memiliki konteks masa lalu, kini dan esok. Masa lalu yang muram, menuntut aksi konservasi menjangkau generasi masa kini untuk menumbuhkan modal sosial jangka panjang. Kesadaran lingkungan generasi muda akan berpengaruh positif bagi masa depan Tripa. Upaya lain yang tak kalah penting, adalah pemantauan di lapangan bersama masyarakat.

Di atas segalanya, Tripa masih menyimpan harapan. Untuk merawat dan memupuk harapan itu, TFCA-Sumatera dan YEL tetap mengawal pelestarian Tripa.

Direktur Program TFCA-Sumatera

Ir. Samed, Ph.D.

PRAKATA

Sebelum heboh kasus kebakaran lahan 2015 yang menyeret 15 perusahaan sawit di Riau, Rawa Tripa telah mengguncang penegakan hukum di Indonesia. Selama kurun 2011-2012, para aktivis lingkungan Aceh menggaungkan aksi konservasi bagi ekosistem Tripa.

Aksi itu tidak hanya berbentuk kampanye, tapi juga upaya hukum. Kendati gerakan sudah mulai sejak 2010, namun baru pada 2011, Walhi—mewakili seluruh komponen yang peduli Tripa—melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatannya: menuntut gubernur Aceh mencabut izin usaha perkebunan PT Kalista Alam.

Itu baru satu kasus. Kasus yang lain, yang relevan dengan kasus Riau 2015, adalah pembakaran lahan oleh Kalista Alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut perusahaan itu atas tindakan membakar lahan. Kalista dinyatakan bersalah di pengadilan Meulaboh dan didenda Rp 336 miliar.

Ini kasus perdata pembakaran lahan pertama yang diajukan Kementerian—dan menang. Meski Kalista banding, lalu kasasi, putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh. Ini vonis pertama dan terbesar sepanjang sejarah kasus pembakaran lahan dan hutan—untuk sementara ini.

Perjuangan hukum tersebut berantai, yang menyangkut satu perusahaan, Kalista Alam, dengan dua kasus. Pertama, kasus izin usaha perkebunan; dan kedua pembakaran lahan. Kendati melewati jalan berliku di pengadilan, hasil akhir kedua kasus melegakan: hukum berpihak kepada lingkungan dan konservasi.

Namun, spektrum gerakan penyelamatan Tripa sangat luas. Di samping upaya hukum, kasus Tripa berkaitan erat dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Saat itu, pemerintah merilis moratorium penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut (PIPIB) sebagai bagian kesepakatan REDD+ Indonesia-Norwegia. Dan, Rawa Tripa masuk dalam daerah terlarang bagi penerbitan izin baru itu.

Keadaan makin rumit. Tiba-tiba saja Rawa Tripa dikeluarkan dari peta moratorium melalui revisi pertama.

Berselang, dua-tiga tahun, pembelajaran dari Tripa nampaknya telah pudar di tingkat nasional. Sekurangnya hal itu terlihat dari kasus kebakaran lahan dan hutan Riau 2015. Kepolisian Daerah Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran lahan itu. Keputusan itu menuai kritik.

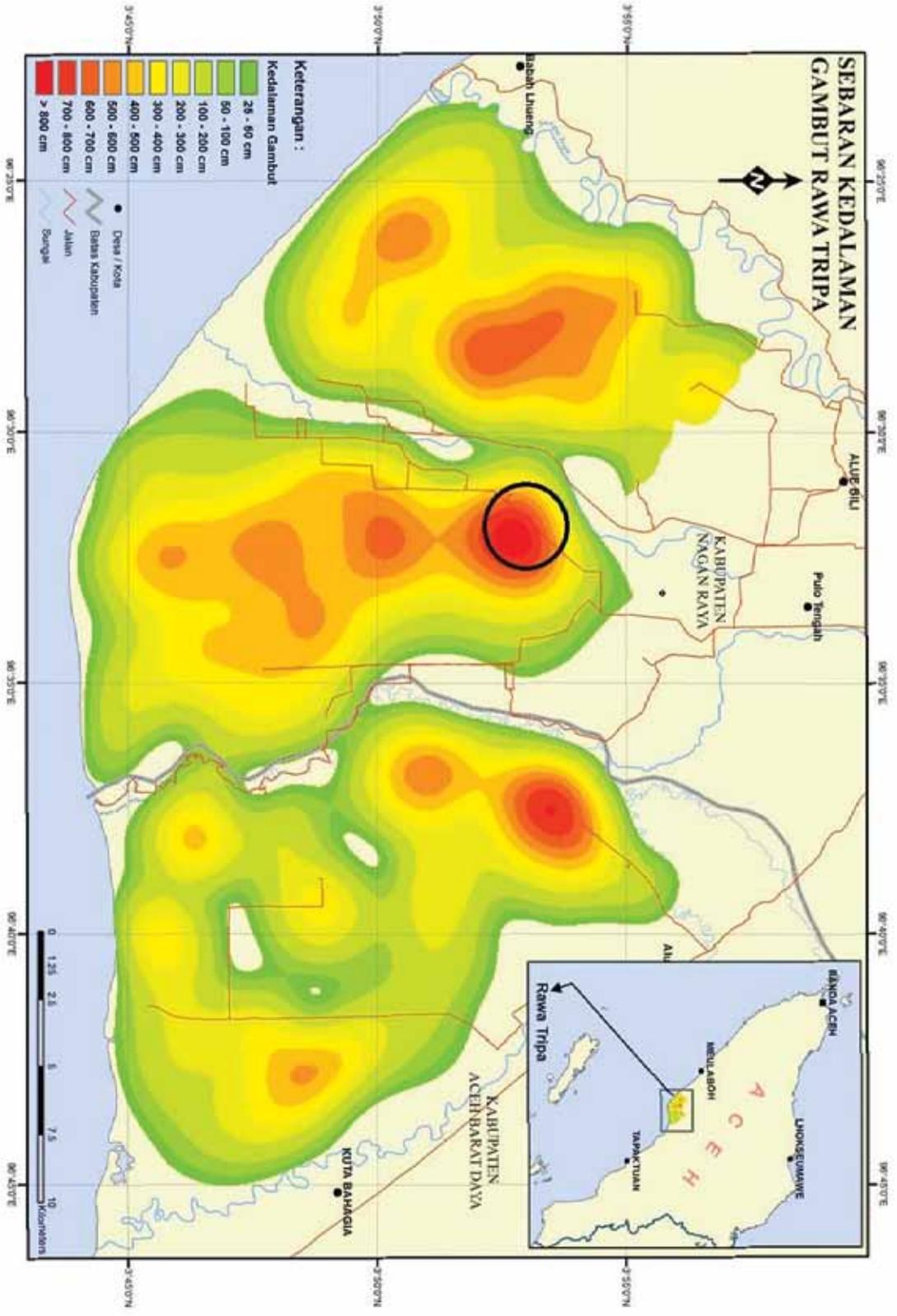
Apapun perkembangan kasus di Riau itu, sebagian wilayah Tripa kini dilindungi. Di bekas lahan Kalista Alam, pemerintah Aceh menetapkan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa pada 2013.

Sejak itu pula beberapa program konservasi dilakukan oleh Yayasan Ekosistem Lestari bersama Tropical Forest Conservation Action-Sumatera. Kegiatannya merentang dari pemberdayaan ekonomi, pembuatan bendungan kanal, pendidikan lingkungan sampai pemantauan kawasan lindung gambut.

Masyarakat sekitar pun memetik hikmah: Tripa memang pantas dilindungi dan dilestarikan bersama-sama. Riwayat konflik sosial yang pernah memanaskan suasana di kawasan ini pelan-pelan sirna.

Hutan gambut di bekas lahan Kalista Alam kini memulihkan diri—kecuali di areal yang terlanjur ditanami sawit. Harapan bagi pelestarian ekosistem gambut ini tumbuh dan berkembang. Tak ada lagi langkah mundur. Tripa harus tetap melangkah ke depan. Yang paling penting: Tripa punya kawasan lindung yang menjaga sisa hutan gambut yang relatif utuh bagi generasi mendatang.

Selamat membaca.





BENDUNG KANAL

Kanal-kanal di bekas lahan PT Kalista Alam dibendung untuk menaikkan air tanah gambut. Dahulu, kanal ini mengalirkan air gambut ke Sungai Seumayam, lalu tumpah di Samudra Hindia. Perlahan-lahan, vegetasi di kanan-kiri kanal tumbuh kembali secara alami.

BALADA RAWA YANG LUKA

LEPAS DARI JERATAN KEBUN SAWIT, SEBAGIAN EKOSISTEM TRIPA
KINI DILINDUNGI DAN DIRESTORASI. INI GANJALAN KECIL BAGI
LAJUNYA PENGGUNDULAN HUTAN GAMBUT
DI PESISIR BARAT ACEH.

Sepasang elang-rawa (*Circus spilonotus*) terbang menyeruak dari semak-semak. Arus bahang melambungkan dua elang itu ke angkasa. Sambil berjalan terseok-seok, Indrianto, Rahmatdani dan Syawaludin hanya mengamati sekilas dua burung pemangsa itu.

Tenaga mereka telah terkuras buat menerabas berbagai rintangan di jalan kebun sawit. Berjalan dari timur ke barat, staf lapangan Yayasan Ekosistem Lestari itu menatap langsung matahari yang berpendar di langit barat. Sinarnya menusuk mata.

Mereka tertatih-tatih menerabas bongkahan kayu, semak yang menjalar, dan tanah yang goyah. Udara panas membekap alam yang berkembang di Rawa Tripa, di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Dari atas matahari menyengat, dari bawah uap panas meruap. Angin mati. Tak ada tempat berteduh. Udara tipis. Ini seperti berjalan menuju neraka jahanam. Dari ujung ke ujung, dalam putaran 360 derajat, hamparan gambut membentang luas. Tanaman sawit muda masih tumbuh rendah.

Pada satu titik, Indrianto duduk di tanah. Ia mengais sedikit keteduhan di semak yang hanya setinggi 1 meter. Tempat teduh bagaikan barang mewah di perkebunan sawit yang telah memabat belantara Rawa Tripa. Rimbunnya tumbuhan bawah memang menepis sengatan matahari, tapi dari tanah gambut, hawa hangat memanggag tubuh. Jadi, duduk di atas tanah seolah mandi sauna, yang memeras cairan tubuh.

“Hanya satu kilometer,” ujar Indrianto, yang juga Koordinator Lapangan Program Tripa Yayasan Ekosistem Lestari. Satu kilometer adalah jarak dalam pandangan mata. Deretan hutan gambut yang terpotong itu memang bisa dilihat dengan mata telanjang: membayang di batas cakrawala. Sekilas, memang nampak berjarak satu kilometer. (Apalagi berjalan di bawah tampanan matahari, jarak ‘satu



Kanal-kanal dibangun oleh Kalista Alam untuk menguras air gambut. Lahan yang kering mencekik pepohonan mati pelan-pelan. Rawa dengan gambut tebal ini dirombak habis untuk dijadikan perkebunan sawit. Di masa lalu, perkebunan sawit menghindari kawasan rawa karena sulit diolah dan produktivitasnya yang rendah.

kilometer’ sungguh menyejukkan hati: lekas sampai tujuan, bebas dari neraka ini.)

Namun jarak sesungguhnya tak kurang 2 kilometer. Jarak tempuhnya bisa lebih jauh lagi. Bayangkan, mereka harus menembus jalan kebun sawit dengan rintangan akar, batang, cabang dan segala serpihan kehidupan yang pernah menaungi rawa. Segala macam serpihan kayu itu untuk menimbun jalan, kata Indrianto. “Agar jalan cepat padat.”

Mendekati titik tujuan, lahan kebun sawit makin berantakan. Pepohonan tumbang. Berserakan. Menghadang. Malang-melintang.

Indrianto mengingatkan agar berhati-hati. Telah menjelajahi sudut-sudut Tripa, Indrianto memahami risiko meniti batang-batang kayu yang berserakan. Mungkin tidak mematikan—kecuali nahas betul, tapi terperosok mendadak akan menyentak detak jantung. Mereka berjalan dengan berpijak batang-batang kayu. Pepohonan rebah berserakan. Dari kedalaman hutan di sisi selatan suara gergaji mesin meraung-raung.

Pada sebuah kanal, Indrianto menunjuk saluran berair hitam yang surut. “Air di sini surut, karena di sana kita bendung,” katanya sembari melayangkan telunjuk ke bendungan kanal. Titik kanal

Setelah ditebangi, pembersihan lahan dilakukan dengan cara membakar sisa-sisa ranting, cabang dan pokok batang. Pembakaran melibas habis segala kehidupan di rawa gambut Tripa. Api membongkar karbon gambut, dan menghambur ke atmosfer.

yang dibendung inilah tujuan Indrianto dan kawan-kawan. Sesampainya di ruas kanal yang disekat, tanpa kenal lelah, Indrianto lantas memeriksa bendungan.

Batang-batang kayu ditancapkan berjajar-jajar di sisi kanan dan kiri sebagai pagar bendungan. Kemudian, di bagian tengahnya, tumpukan kayu ditimbun dengan tanah. Indrianto menuturkan, tabat ini dibuat kokoh agar tak mudah dirusak oleh orang lain. Ada saja yang berniat buruk menjebol sekat kanal. “Kayu-kayu besar itu kita tancapkan dengan alat berat. Itu sudah aman, dan gambutnya tidak terkikis. Jadi sangat kuat.”

Titik ini salah satu lokasi penyumbatan kanal di lahan bekas hak guna usaha PT Kalista Alam, di Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Dari rencana semula 18 titik, akhirnya pembendungan dilakukan di 17 titik. Peta lahan bekas Kalista Alam itu berbentuk seperti sepatu *boot*. “Lokasi ini terletak di ujung ‘sepatu,’” lanjut Indrianto sembari menyentuh ujung sepatu *boot*-nya. “Dan kita membendung kanal yang dibuat Kalista Alam di bekas arealnya.”

Kanal yang membujur dari barat ke timur ini menampung seluruh aliran air dari utara yang memecah-belah lahan seluas 1.605 hektar. Dari kanal besar ini, air mengalir ke timur, lantas tumpah di Krueng (sungai) Seumayam.

Dengan demikian, titik sekat ini merupakan salah satu benteng pertahanan

dalam membendung air gambut agar tak mengalir ke sungai. Di sisi barat tanggul, air hitam menggenang hingga nyaris menyentuh bibir kanal. Sementara di sisi timur, ke arah Krueng Seumayam, air surut hingga dasar parit.

Panjang kanal ini sekira empat sampai lima kilometer yang sekaligus membatasi bekas lahan Kalista Alam dengan PT Surya Panen Subur 2. Di antara batas kedua perkebunan ini, hutan rawa gambut bolong memanjang dengan ujung nun jauh di sana.

Semenjak ditabat, seiring naiknya muka air, hutan sekunder mulai tumbuh di lapisan kedua. Sisa-sisa hutan gambut nampak dari pohon-pohon tua yang meranggas. Pohon-pohon itu sekarat, karena air gambut yang mengering, dan tidak bisa tumbuh kembali. Cabang-cabangnya yang kusam menjalar di langit biru.

Indrianto mengisahkan, sejak dibendung, air kanal naik begitu cepat. Semula, muka air kanal hanya berkisar 32 cm. Sehari-semalam setelah ditutup, air kanal naik lebih dari satu meter.

Meski baru dibangun pada tahun 2015, tanggul-tanggul yang menyumbat lusinan kanal di bekas areal Kalista Alam itu adalah wujud upaya melestarikan Rawa Tripa. Upaya itu baru ganjalan kecil bagi lajunya penggundulan hutan Tripa. Kendati baru mencakup secuil wilayah Tripa, namun tanggul-tanggul itu menandai ekosistem berlimpah manfaat ini pantas dilestarikan.



ASA EKOSISTEM TRIPA

Tripa memendam tiga kubah gambut yang dibatasi sungai-sungai besar. Ekosistem ini laksana spon raksasa: memasok air kala kemarau; mengendalikan luapan air saat puncak musim hujan. Masyarakat lokal memanen ikan, lokan dan air bersih. Kendati berada di sudut Aceh, Tripa punya kendali terhadap iklim global. Menjaga Tripa berarti menjaga stok karbon sebesar 4,3 – 5,2% dari komitmen Indonesia dalam memangkas emisi karbon—26% secara unilateral.

Tandon Karbon

Di hamparan rawa gambut Tripa, terpendam tiga kubah gambut yang dalamnya sampai 8 meter. Simpanan karbonnya berkisar antara 50 sampai 100 juta ton. Perkebunan sawit akan membongkar gambut dan melepas 33 juta ton karbon sampai tahun 2038. Bahkan saat perkebunan telah beroperasi, Tripa masih akan melepas 1 juta ton per tahun. Emisi karbon ini sebagai dampak dari pengeringan gambut melalui kanal-kanal dan proses oksidasi.

Benteng Bencana

Saat tsunami 2004, Tripa melindungi kawasan pesisir di sekitarnya—begitu juga Rawa Singkil dan Kluet. Pagar alam ini efektif melindungi kawasan pesisir barat Aceh. Bukti yang teruji itu menegaskan Tripa berperan dalam mitigasi tsunami di masa datang. Selain membongkar habis hutan gambut, kebun sawit bakal membuka permukiman yang makin membuat rentan wilayah pesisir.

Iklim Mikro

Sebagai pengikat air, gambut Tripa mengatur aliran air yang mencegah banjir. Lahan basahnya mencegah kebakaran hutan dengan menjaga kelembapan udara tetap tinggi, di atas 90 persen, dan memelihara suhu udara tetap stabil antara 25-26° C.

Penyangga Kehidupan

Saat musim kering, rawa gambut Tripa memasok air bagi kebutuhan rumah tangga dan irigasi pertanian lokal. Lahan basah menyediakan habitat berpijah bagi ikan yang mendukung kebutuhan protein dan ketahanan pangan lokal.



Orangutan yang terperangkap di habitat kecil di hutan yang dibuka di Babahrot, Aceh Barat Daya.

Rumah Mawas

Wilayah ini rumah bagi orangutan sumatra, bersama harimau sumatera, beruang madu dan satwa liar lainnya. Rawa gambut di pesisir barat Aceh, yaitu Singkil, Kluet, dan Tripa didiami populasi orangutan terpadat di dunia. Peneliti mencatat pasokan pakan bagi orangutan di rawa gambut lebih konstan dibandingkan dengan hutan dataran kering. Orangutan yang hidup di Singkil, Kluet dan Tripa piawai memakai alat untuk mengunduh makanan. Tripa didiami sekitar 280 orangutan atau 4% populasi di dunia salah satu dari enam cadangan populasi liar yang mampu berkembang biak secara alami.

SUMBER:

LAPORAN SURVEI LAPANG RAWA GAMBUT TRIPA (KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DAN NAGAN RAYA, ACEH, INDONESIA). 2015. PENYUSUN: MATTHEW G. NOWAK. 2015. YAYASAN EKOSISTEM LESTARI, PANECO FOUNDATION, TFCA SUMATERA, SOCP.
ORANGUTAN DAN EKONOMI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI SUMATERA. 2011. EDITOR: SERGE WICH, RISWAN, JOHANN JENSON, JOHANNES REFISCH DAN CHRISTIAN NELLEMMANN. ALIH BAHASA: GUNUNG GEA. UNEP/GRASP/PANECO/YEL/ICRAF/GRID-ARENDAL.



HUTAN RAWA gambut di Provinsi Aceh tersebar di beberapa kabupaten: Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Di Aceh Selatan terdapat Rawa Ringkil yang seluas 100.000 hektar; di Aceh Selatan, ada Rawa Kluet seluas 18.000 hektar; dan di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, menghampar Rawa Tripa seluas 61.000 hektar.

Kawasan rawa gambut di Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Sementara Kluet tercakup dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Sayangnya, Rawa Tripa menjalani nasib yang berbeda: menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) bukan kawasan hutan yang dikaplingkapling perusahaan sawit. Rawa bergelimang jasa lingkungan ini habis dibagi rata dalam petak-petak konsesi

sawit.

Alam Tripa yang datar menampung aliran air dari dataran tinggi dalam bentangan Bukit Barisan. Air turun mengikuti aliran Krueng Tripa, Krueng Seumayam, Krueng Seuneuam, dan Krueng Batee. “Di situ, di Rawa Tripa, air berkumpul,” ungkap Indrianto.

Sayangnya, sejumlah perusahaan menjejali ekosistem gambut Tripa. Selain Kalista Alam, ada PT Gelora Sawita Makmur, PT Cemerlang Abadi, PT Patriot Guna Sakti Abadi, PT Surya Panen Subur (sebelumnya PT Agra Para Citra), dan PT Dua Perkasa Lestari. Seluruhnya, perusahaan tersebut menguasai 38,6 ribu hektar Rawa Tripa. Dan hanya sekitar 12,5 ribu hektar yang masih berselimut hutan dan luasan ini bakal terus menyusut.

Di balik status lahannya itu, para peneliti dan aktivis lingkungan telah



Setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, kanal-kanal di lahan bekas Kalista Alam dibendung. Upaya ini memerlukan kerja keras selama satu bulan lebih dengan bantuan alat berat. Tabat dibangun sekuat mungkin agar tak mudah jebol dan dirusak oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

mengingatnkan peran Tripa sebagai penyangga kehidupan. Kian hari, seiring dengan iklim global yang berubah, fungsi ekologis Tripa makin mengemuka. Kendati berada di sudut Aceh, fungsi ekosistem Tripa amat bernilai dalam penyelamatan iklim global.

Seawal 1998, Tripa telah tercakup dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sehamparan wilayah yang dirancang untuk dikelola sesuai kaidah konservasi. “Tripa masuk dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser itu didasarkan pada beberapa kriteria.

Salah satunya, aspek keanekaragaman hayati. Nah, Tripa memenuhi syarat itu,” Indrianto memaparkan.

Salah satu yang menjadi perhatian para peneliti adalah kandungan karbon Tripa. Hasil kajian Pusat Penelitian Tanah-Bogor, World Agroforestry Centre (ICRAF), PanEco, Yayasan Ekosistem Lestari dan Universitas Syiah Kuala menunjukkan kedalaman lahan gambut bervariasi dari satu hingga lima meter. Yang paling mutakhir, pada 2013-2014, kajian Yayasan Ekosistem Lestari dan Tropical Forest Conservation Action Sumatera makin menegaskan tebalnya lahan gambut Tripa. Penelitian ini menyingkap kedalaman



Seiring rusaknya fungsi hidrologi rawa Tripa, kawasan permukiman di sekitarnya kerap dilanda banjir. Rawa Tripa berada di wilayah hilir yang berperan penting dalam menampung aliran air dari bagian hulu di deretan Bukit Barisan.

gambut mencapai 8,5 meter dengan rata-rata 3,46 meter.

Lapisan gambut berpusat di tiga kubah yang mengendap di bawah tanah di sisi utara ekosistem Tripa. Lihat gambar halaman xi kubah-kubah gambut ini berderet dari barat daya hingga timur laut. Kubah paling barat dibatasi Krueng Tripa, lalu dua kubah lain berjajar ke timur hingga Krueng Batee di Kabupaten Aceh Barat Daya. Semakin ke arah pesisir, lapisan gambut semakin menipis, antara 25-30 cm.

Kubah-kubah ini dipisahkan dua sungai: Krueng Seuneuam dan Krueng Seumayam, yang mengalir dari utara



sampai Samudra Hindia. Artinya, Tripa merupakan satu kesatuan hidrologis dalam cakupan Daerah Aliran Sungai Tripa Batee salah satu daerah aliran sungai strategis nasional.

Bisa dibayangkan bencana lingkungan yang terjadi bila kanal-kanal dibangun di ekosistem yang sarat jasa alam ini. Tujuan pembuatan saluran-saluran air agar tanah gambut mengering, lantas bisa ditanami sawit. Air yang terikat dalam lapisan gambut akan merembes keluar, mengalir ke kanal-kanal pembuangan. Gambut memang ibarat spon: kanal kanal akan memeras airnya, lalu tanah gambut ambles.

Jadi, semenjak dibangun kanal untuk perkebunan sawit, air dari rawa gambut tumpah ruah ke sungai-sungai. “Terjadilah banjir bandang,” ujar Indrianto. Kerontangnya rawa-rawa jelas mencekik semua jenis vegetasi gambut. Vegetasi mati perlahan-lahan. Pohon-pohon yang layu lantas dibersihkan. Cara paling gampang: dibakar! Selain murah, pembakaran juga dalih untuk memusnahkan hama yang bisa menyerang sawit. Pendek kata, pemusnahan besar-besaran Rawa Tripa hanya untuk memenuhi hasrat perkebunan sawit. Itu petaka yang sempurna.

Sirnanya ekosistem Tripa melibas habis jasa lingkungan sebagai penyerap karbon. Lantas, saat dibakar, karbon yang terpendam di lapisan gambut akan lepas ke atmosfer. Artinya, Tripa bukan lagi pembawa berkah bagi Bumi. Sebaliknya, Tripa menjadi biang musibah kala iklim global terus berubah.

World Agroforestry Centre, bersama PanEco dan Yayasan Ekosistem Lestari, pernah melakukan kajian cepat ihwal jasa ekosistem Tripa dan Batang Toru. Hasil kajian: Konversi lahan di Rawa Tripa selama 1990-2009 terbilang tinggi dibandingkan dengan Batang Toru. Laju penggundulan hutan tahunan di Batang Toru hanya 0,11 persen per tahun, sementara di Tripa sangat tinggi: 5,03 persen!

Jika tren itu terus berlanjut, hutan Tripa akan sirna pada 2015-2016. Dampak selanjutnya, tandon karbon di atas permukaan tanah bakal menyusut dalam kurun 20 tahun. Lahan gambut Tripa menghadapi degradasi karbon secara signifikan: musnahnya 66 ton karbon per hektar selama 1990-2009. Dalam hal emisi CO₂, Tripa akan melepas 1.439.499 tCO₂ setiap tahun. Emisi itu akan jauh lebih tinggi bila karbon di bawah tanah juga dihitung.

SORE MENJELANG di pasar Seumayam. Pasar telah sepi. Di salah satu sudut pasar, Juani beserta istrinya membuka kedai sederhana. Warungnya telah tutup. Di teras kedai, di dalam kotak styrofoam, Juani menyimpan selusin ikan lele rawa yang tersisa. “Tadi pagi banyak. Kalau sore tinggal sedikit,” tutur Juani, bersuka cita.

Dia salah satu warga Seumayam yang sehari-hari mencari ikan di Rawa Tripa. Biasanya, dia memasang puluhan bubu di rawa-rawa, lalu ditinggalkan selama tiga hari. Pada hari ketiga, ujar Juani, “Bubu ditengok. Hasilnya saya bawa pulang.”

Jika beruntung, ia bisa memperoleh berbagai jenis lele sampai lima kilogram. “Kalau banjir, bisa lebih dari lima kilogram,” jelasnya. Selain menjual sendiri, ia juga memasok lele bagi para penjual ikan. Dia menjualnya Rp 60.000 per kilogram.



Selama bertahun-tahun, Juani menggantungkan hidupnya pada perikanan alami Rawa Tripa. “Itu anak saya jadi tentara juga dari lele,” katanya bangga, sambil menunjuk sebingkai foto anak lelakinya yang berseragam Tentara Nasional Indonesia.

Sebagian warga Seumayam, seperti Juani, dikenal sebagai penduduk ikan Rawa Tripa. Kawasan Tripa telah menopang masyarakat sekitarnya dengan menyediakan perikanan rawa yang dipanen secara tradisional.

Namun, perlahan-lahan perkebunan sawit merangsek ke rawa-rawa. Tripa telah berubah. Rawa-rawa diperas, airnya



dibuang melalui kanal-kanal. Padahal, di atas dan di dalam tanah gambut, kehidupan berkembang semarak.

Para pencari ikan sering berpijak di sematang untuk membuat lubang kecil di tanah gambut. Dari lubang kecil ini, ikan-ikan dari dalam gambut merangkak naik. “Di situlah bubu dipasang. Saat ikan naik, ia akan terperangkap,” jelas Suratman, seorang warga Tripa dari Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur.

Sematang adalah gundukan tanah mineral yang dikelilingi tanah gambut. “Itu seperti pulau-pulau di hamparan gambut,” paparnya. Di sematang inilah harimau sumatera, beruang madu,

Kawasan pantai barat Aceh menghembuskan kehidupan bagi masyarakat pesisir. Dengan pengalaman tsunami hebat di masa lalu, kawasan pesisir memerlukan sabuk hijau untuk mengurangi dampak kerusakan bencana alam.



burung kua, dan satwa liar lainnya hidup. Satwa liar mengandalkan sematang untuk berburu mangsa dan kawin-mawin.

Kini, semenjak alam rawa telah dirombak habis-habisan, Suratman mengamati goyahnya kehidupan masyarakat setempat. Untuk mencari lele, sebagian warga kini harus melalui kuala Seumayam. “Itu karena rawa-rawa yang masih bagus berada di dekat pesisir. Sekarang pencari lokan dan ikan harus melewati gelombang besar. Baru-baru ini juga ada yang dihantam ombak. Pencari ikan harus melintasi muara dekat pinggiran laut, karena rawa-rawa yang masih bagus ada di situ. Itu pun orang harus menginap satu minggu,” ujar Suratman.

Alhasil, pendapatan tak lagi sesuai harapan. “Paling-paling sekarang hanya dapat 10 kilogram seminggu. Harganya Rp 60.000, tinggal mengalikan 10

kilogram. Itu belum biaya makan untuk menginap. Sedih.”

Dalam wawasan Suratman, kanal perkebunan sawit menggelontorkan gambut ke sungai yang melibas ikan dan lokan. “Akibatnya potensi lokan dan ikan Krueng Seumayam menyusut,” imbuhnya. “Lokan atau kerang ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal.”

Dia mengingatkan dampak negatif kanal yang dibendung di bekas lahan Kalista Alam yang dikunjungi Indrianto. “Sudah jelas kanal itu menuju ke Krueng Seumayam. Kalista Alam membuat kanal besar yang diarahkan ke sungai. Gambut jelas ikut mengalir, dan mendangkalkan sungai.”

Suratman mengamati bahwa sedimen gambut yang mengendap di Krueng Seumayam membuat kerang bergeser ke arah muara. Artinya, kata dia, masyarakat



Pembukaan gambut memerlukan pengorbanan lain dari sumber daya alam di sekitarnya. Untuk memadatkan jalan, kebun sawit butuh tanah mineral yang ditanggung dari sebuah bukit di tepi jalan raya Meulaboh-Tapak Tuan (kiri). Alat berat mengeruk pasir di Krueng Tripa, salah satu sungai yang membatasi kubah gambut Tripa (atas).

harus menempuh jarak yang semakin jauh untuk mencari lokan. Dampak negatif itu memang berjarak dari perusahaan sawit. Mereka, kata Suratman, tidak merasakan dan melihat langsung dampak pembukaan kanal yang mengalir ke sungai.

Dia mengingatkan kembali peran penting Rawa Tripa sebagai daerah pengikat air. “Kami merasakan Tripa memang sudah hancur. Dahulu hujan memang sering, banjir juga terjadi. Tapi, setelah Tripa hancur, sewaktu musim hujan, banjir makin kerap terjadi. Lahan-lahan pertanian tergenang, petani pun merugi,” ujar pria yang juga penyuluh pertanian ini. Saat hutan rawa gambut

masih bagus, banjir hanya melanda sesekali dalam satu tahun. “Itu wajar. Itu namanya fenomena alam biasa. Tapi akhir-akhir ini, setahun bisa lima sampai enam kali banjir dan meluas. Itu fenomena luar biasa.”

Perlahan tapi pasti, kanal-kanal bagaikan penjebol benteng pertahanan pesisir Tripa. Setiap kanal yang mengarah ke laut membobol sempadan pantai Rawa Tripa. Sebagai daerah yang rawan tsunami, hutan rawa gambut Tripa menjadi benteng bagi daerah sekitarnya dari terjangan ombak.





Para pedagang menyambut kedatangan para nelayan yang membawa tangkapan ikan dari Samudra Hindia di pesisir dekat Meulaboh. Perikanan tangkap di perairan dangkal sangat bergantung pada pasokan nutrisi dari rawa Tripa. Perlahan tapi pasti, perombakan rawa gambut Tripa akan meruntuhkan ekonomi perikanan tangkap di sekitarnya.



KERAJAAN PALMA

Perkebunan sawit merajai bentang alam Nagan Raya. Berlatar belakang Bukit Barisan yang megah, hamparan sawit ini berada di dataran lebih rendah dan rata. Air dari Bukit Barisan berkumpul di hilir, salah satunya di rawa Tripa, yang mengendapkan bahan organik selama jutaan tahun. Bila sawit telah merebut sebagian besar daratan, Tripa semestinya disisihkan untuk perlindungan gambut.





Petugas kehutanan memeriksa lahan bekas Kalista Alam. Setelah kalah dalam pergulatan hukum, lahan bekas perusahaan ini diklaim oleh oknum-oknum yang mengastanamakan masyarakat. Pendakuan serampangan ini terjadi di lahan yang terlanjur ditanami sawit oleh Kalista.

Suratman membuka kembali kenangan tsunami Desember 2004, yang melantak kehidupan Aceh. Hutan rawa gambut di pesisir Aceh: Tripa, Singkil dan Kluet, berguna sebagai zona penyangga daratan. Tak mengherankan, hampir tak ada korban yang tercatat di wilayah-wilayah itu. Di kawasan rawa itu, hanya warga yang berdiam dekat laut dan di lokasi tak berhutan yang menjadi korban. Contohnya: tsunami menerjang desa pesisir Kuala Tripa di ujung barat laut Rawa Tripa bersama sejumlah desa sekitarnya.

Suratman memberikan contoh: PT Gelora Sawita Makmur membuka kanal

yang mengarah ke laut. "Itulah yang terkena hantaman gelombang tsunami. Sedangkan di sempadan yang berhutan bagus, sama sekali tidak ada dampak tsunami. Itu peran nyata Rawa Tripa." Saat itu, hutan Tripa masih bagus, lanjutnya, "Kalau sudah hancur seperti sekarang, mau jadi apa pemukiman di pesisir Tripa...."

Dalam perspektifnya, tanpa upaya penyelamatan, Suratman seakan membaca tengara kiamat ekologi akan melanda kawasan yang gemah ripah ini. Di daratan, kubah-kubah gambut yang dikeringkan akan menyusut, lalu ambles beberapa meter. Sementara sempadan



garis pantai lambat-laun bakal runtuh diterjang ombak Samudra Hindia. Apalagi permukaan laut global akan meningkat pada dasawarsa mendatang.

Tripa dikepung bencana dari dua sisi: daratan gambut turun dan pantai yang tergerus. Tak pelak lagi, samudra akan merangsek ke pedalaman dataran Tripa. “Di masa depan, Tripa bisa menjadi lautan. Air laut masuk karena tanah gambutnya turun. Dan saya sudah punya nama, yaitu Lautan Tripa,” kata Suratman getir.

MATAHARI kian mendekati ufuk barat. Indrianto, Rahmat Dani dan Syawaludin

beringsut dari titik bendungan itu. Kendati matahari meredup, hawa hangat masih memeras keringat. Kala mereka meniti batang-batang pohon yang rebah, gergaji mesin meraung dari kerumunan hutan di selatan.

Rahmat Dani menyelidik suara gergaji itu. Yang nampak hanya deretan hutan rawa yang kusam di kaki langit selatan. Terlalu jauh. Namun hentakan gas mesin gergaji terdengar dekat. Raungan itu merambat bebas tanpa penghalang di udara yang hangat. Nun jauh di selatan, pohon-pohon tua meranggas.

Kini, pemerintah Aceh telah menetapkan sebagian tanah rawa ini sebagai kawasan lindung gambut. Dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh 2013-2034, pemerintah Aceh telah menetapkan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa seluas 11.359 hektar.

Kawasan lindung mencakup bekas areal Kalista Alam yang seluas 1.605 hektar, dan sebagian areal PT Surya Panen Subur, seluas 5.000 hektar. Sisanya, kawasan lindung gambut meliputi sepanjang pesisir dan sempadan sungai.

Kasus Kalista Alam memberikan pembelajaran: Surya Panen Subur memutuskan sebagian arealnya untuk keperluan konservasi.

“Hanya saja, siapa yang akan mengelola dan menjaga?” tanya Indrianto. “Hutan konservasi itu ditetapkan hanya untuk kepentingan perusahaan.” Pertanyaan itu masuk akal. Suara gergaji mesin itu menandakan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa tidak dalam pengawasan.

Rupanya penetapan kawasan lindung juga menyulut gejolak sosial. Ini terjadi karena adanya tanaman sawit seluas 200 hektar di kawasan lindung gambut, yang

terlanjur ditanam oleh Kalista Alam—di bekas lahan 1.605 hektar. Usai ditetapkan sebagai kawasan lindung, rumor malah berkembang di masyarakat: kebun sawit itu bebas dikelola. Sejumlah oknum warga berebut mengapling lahan sawit yang ada di kawasan lindung.

Setelah menimbang dinamika sosial, pemerintah Aceh mengambil langkah mengelola kebun sawit itu dengan masyarakat. Harapannya, kebun sawit tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tanpa mengurangi luas kawasan lindung gambut Tripa.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Husaini Syamaun menuturkan bahwa tugas pertama pemerintah adalah mengamankan kawasan lindung gambut agar tidak dikuasai orang lain. Dengan demikian, untuk mengelola lahan sawit yang terlanjur di kawasan lindung gambut, Dinas bekerjasama dengan Koperasi Kopermas Sinpa.

Lantaran ada sawit yang terlanjur ditanam, masyarakat diharapkan bisa mengelolanya. Syaratnya, tidak melanjutkan menanam sawit. “Nanti pada akhir daur, sawit harus ditebang dan ditanami dengan tumbuhan rawa. Selain itu, sawit juga tidak menguntungkan untuk daerah rawa-rawa,” ungkap Husaini sambil menegaskan pentingnya kerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian kawasan lindung gambut.

Dengan kerjasama itu masyarakat diharapkan memahami keberadaan



kawasan lindung gambut. Husaini mengimbuhkan, Dinas mementingkan kerjasama dengan masyarakat, dan menegaskan secara legal-formal bahwa bekas lahan Kalista Alam adalah kawasan lindung gambut.

Selain bagi hasil 10 persen untuk pemerintah Aceh dan 5 persen buat pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Koperasi Sinpa juga berkewajiban melakukan perlindungan hutan di sekitar kebun sawit, mencegah perambahan dan kebakaran hutan, tidak melakukan penebangan dan perburuan satwa liar di Kawasan Ekosistem Leuser.



Restorasi lahan gambut dimulai dengan pemulihan fungsi hidrologisnya. Seiring naiknya muka air tanah, tumbuhan khas rawa akan tumbuh secara alami. Percepatan pemulihan ekosistem ini dilakukan dengan penanaman tumbuhan rawa.

Husaini mengimbuhkan bahwa harapan utama kerjasama itu adalah kelestarian hutan. “Golnya adalah meningkatkan martabat orang Aceh bahwa kita memang menjaga kawasan lindung gambut.” Dia menegaskan, dengan meningkatnya suhu rata-rata Bumi, orang makin menyadari potensi Tripa sebagai penyerap gas rumah kaca. “Sekarang Rawa Tripa harus dipelihara bersama-sama. Dunia ikut memelihara, dan kita juga bangga rakyat Aceh juga menjaganya.”

NAMUN, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut, Rawa Tripa

terombang-ambing dalam pertarungan bertahun-tahun. Pergulatan ini memberikan hikmah dan pelajaran dalam melindungi ekosistem gambut yang rentan. Pada saat negeri ini baru menyadari betul peran penting tanah gambut, Tripa telah menjalani pertarungan dramatis.

Tripa menyatukan masyarakat sipil dalam gerakan pelestarian kekayaan hayati ekosistem rawa gambut. Sebelum tabat menyumbat kanal-kanal di bekas lahan Kalista Alam, sebelum kawasan lindung ditetapkan, pendulum bergoyang antara dua titik ekstrem: melestarikan atau mencampakkan Tripa.***

DISISITTI 2015

ALHAMDULILLAH
KAWASAN LINDUNG GAMBI
RAWA TRIPA
DAPAT KITA JAGA BERSAMA
DINAS KEHUTANAN AGR



PADA AKHIRNYA...

Pemerintah Aceh akhirnya menetapkan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa di lahan bekas Kalista Alam. Sebagian areal yang telah ada tanaman sawitnya dikelola oleh koperasi yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Aceh. Kelak, di masa akhir daur, lahan ini akan dikembalikan menjadi rawa gambut.



TENGGORAK GOSONG

Batok kepala primata ini simbol malapetaka antropogenik yang melanda Tripa. Pembakaran lahan gambut melumat aneka kehidupan yang berkembang selama jutaan tahun. Tripa menyediakan habitat bagi orangutan, beruang madu, harimau sumatera. Perkebunan sawit tak hanya mengikis habitat satwa liar, namun juga menumpas segala jenis flora rawa.



DRAMA TRIPA

MASYARAKAT SIPIL BERGERAK SERENTAK
MENYELAMATKAN EKOSISTEM TRIPA.
PERGULATAN ADVOKASI DRAMATIS, YANG DISELINGI
INTIMIDASI.

Sebingkai foto itu menggedor akal sehat. Indrianto menunjukkan tengkorak primata gosong yang teronggok di hamparan gambut yang terbakar. Di kantor lapangan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dia menampilkan foto tengkorak itu di layar komputer jinjingnya.

“Saya melarang membawanya. Itu barang bukti,” tutur Koordinator Program Tripa, di kantor YEL di Allu Bilie, Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh.

Semula ia menyangka tengkorak gosong itu kepala orangutan sumatera (*Pongo abelii*) yang terbakar di lahan gambut Rawa Tripa, Nagan Raya, Aceh. Maklum, beberapa bulan sebelumnya, dia menyaksikan dua orangutan di lahan yang dikuasai oleh PT Kalista Alam dan PT Surya Panen Subur.

Kemudian hari, dia tahu batok kepala dengan lubang mata yang menganga itu bukan tengkorak orangutan. “Itu mungkin tengkorak monyet ekor panjang atau primata lain. Tapi bukan orangutan.”

Foto itu seolah membuka kembali lembaran muram di hutan gambut Tripa seputar tahun 2012. Ingatan Indrianto masih terang benderang. Api pernah

menghanguskan hamparan gambut Tripa yang berada di areal perkebunan sawit Kalista Alam dan Surya Penen Subur.

Dari berbagai rekaman foto, Indrianto menunjukkan segala kehidupan rawa gambut telah sirna dilalap api. Pembakaran merupakan cara perkebunan sawit membersihkan lahannya. Mudah dan murah. Namun pembakaran juga cara yang tak beradab: melumat habis apapun yang pernah hidup di Rawa Tripa. Ekosistem yang bergelimang jasa lingkungan ini menjadi korban nafsu beringas perkebunan sawit.

Semenjak menjadi bulan-bulanan perusahaan sawit, habitat orangutan sumatera di hutan Tripa terpecah-belah. Akibatnya, pecah konflik antara primata yang terancam punah itu dengan manusia.

Pembukaan hutan menyisakan ‘pulau-pulau’ habitat yang mengurung orangutan



Salah satu tengara muram pembukaan gambut Tripa adalah seringnya kejadian banjir. Lumpuhnya peran rawa gambut berdampak buruk terhadap tata air. Keseimbangan menjadi alam porak-poranda: banjir saat musim hujan, dan kekeringan saat kemarau. Tripa juga menyimpan jasa lingkungan rawa gambut yang menghidupi warga sekitar.

sehingga sulit bergerak untuk mencari pakan atau pasangan hidup. “Kita sudah menyelamatkan orangutan sekitar enam kali. Itu sekitar 10 orangutan.”

Pada masa-masa itu, aktivis lingkungan Aceh bergabung dalam gerakan besar untuk menyelamatkan salah satu hamparan gambut di pesisir barat Aceh ini. Kala itu, Indrianto mengenang: “Saya mendapatkan salinan IUP-B atau izin usaha perkebunan budidaya PT Kalista Alam dari masyarakat. Kemudian saya bagikan ke teman-teman yang bergiat di bidang lingkungan di Banda Aceh.”

Dalam bulan Agustus 2011,

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memang mengeluarkan izin itu untuk Kalista Alam yang mencakup lahan 1.605 hektar. Tak hanya Yayasan Ekosistem Lestari, pihak-pihak lain terkesiap dengan keluarnya izin gubernur itu.

Kalista Alam sebenarnya hanya memiliki izin lokasi dari bupati Nagan Raya yang berakhir pada 5 Februari 2011. Izin lokasi ini hanya salah satu syarat untuk memperoleh izin perkebunan. Tapi gubernur Aceh memberikan izin perkebunan pada Agustus 2011. Artinya ada yang janggal, izin lokasi telah habis masa berlakunya, namun izin perkebunan tetap diterbitkan gubernur Aceh.

Serangga unik dan anggun ini hidup di pedalaman rawa Tripa. Keanekaragaman hayati Tripa belum banyak dikaji dan diteliti. Sayangnya, sebelum dipahami benar, plasma nutfah di Tripa terancam oleh ekspansi kebun sawit.

Kejanggalan inilah yang membuat aktivis lingkungan menggugat izin perkebunan dari gubernur.

Bahkan sudah semenjak 2010, staf Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) lembaga pemerintah Aceh yang mengelola Kawasan Ekosistem Leuser, menemukan keganjilan di lapangan. Dalam artikel *Fragmentasi Institusi atau Kolaborasi? Sebuah Pelajaran dari Tripa, Aceh*, Farwiza Farhan dan Laurens Bakker menuturkan bahwa untuk dapat mengantongi izin perkebunan, Kalista Alam mesti berbekal penunjukan lahan (izin lokasi) dari bupati, yang diikuti dengan izin prinsip dari gubernur. Lantas, Kalista Alam wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atas rencana kegiatannya. Setelah dokumen analisis dampak disetujui Dinas Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten, perusahaan baru bisa mengurus Izin Usaha Perkebunan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Badan Pelayanan ini akan meminta instansi terkait untuk menganalisis permohonan itu, baik secara teknis maupun hukum. Bila izin sudah didapat, perusahaan baru dapat beroperasi membuka lahan.

Namun, sebelum memiliki izin usaha perkebunan, Kalista Alam telah membuka lahan pada 2010. “Setelah mendapat konfirmasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bahwa Kalista Alam

tidak memiliki izin untuk membuka lahan, BPKEL melaporkan temuan ini ke Kepolisian Daerah Aceh sebagai tindak pelanggaran kehutanan,” catat Farwiza dan Bakker.

Setelah melakukan investigasi, Polda Aceh menutup kasus itu dengan konfirmasi bahwa Kalista Alam memang telah membuka lahan sebelum mendapat izin. Namun Polda memberi rekomendasi: perusahaan diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai izin yang diperlukan.

Pendek kata, Kalista Alam telah berkegiatan di lapangan sebelum mengantongi izin perkebunan. Aktivitas perusahaan ini berupa pembersihan lahan dengan membakar, membangun kanal, dan menanam sawit di areal yang belum berizin.

Berbagai keanehan itulah yang melecut masyarakat sipil Aceh bergerak demi lestarnya Rawa Tripa. Para pegiat lingkungan dan lembaga nonpemerintah di Tim Koalisi Penyelamat Rawa Tripa (TKPRT) lantas berdiskusi membahas kebijakan Gubernur Irwandi. Tim Koalisi merupakan himpunan berbagai lembaga yang peduli terhadap Rawa Tripa yang terbentuk pada 2008.

Bersama TKPRT, melalui media nasional maupun internasional YEL melakukan advokasi pelestarian Rawa Tripa. Yayasan Ekosistem Lestari juga memasok data ke media dan mengumpulkan bukti bagi





Seekor kura-kura ini ditemukan tertatih-tatih menyeberangi jalan raya di kebun sawit. Tubuh dan karapasnya berbau minyak sawit dan licin. Barangkali dia mencari tempat hidup yang lebih layak, jauh dari keriuhan kebun dan pabrik kelapa sawit. Perombakan rawa gambut Tripa telah menelan banyak korban kehidupan liar.





penegakan hukum di Tripa.

“Kita sudah mulai berkiprah untuk Rawa Tripa sejak 2007, dan mulai intensif pada 2008. Artinya, TKPRT sifatnya kolektif,” papar Irsadi Aristora, yang pernah menjadi juru bicara Tim Koalisi, yang saat itu juga berkiprah di lembaga Silva. Kian hari, dia menuturkan, gerakan Tim Koalisi makin kuat. “Alhamdulillah, dukungan waktu itu ada sekitar 17 lembaga.”

Namun, gerakan ini juga mengalami pasang surut. “Begitu kita sudah mengerucut ke arah perjuangan yang lebih jelas, sebagian lembaga mulai mundur. Yang dulu berkomitmen, akhirnya memilih membantu di belakang layar. Akhirnya tinggal 13 lembaga.” Berbagai lembaga inilah, ungkap Irsadi, yang saling berbagi tenaga, pikiran dan dana.

Melalui Tim Koalisi, masyarakat sipil melakukan advokasi penyelamatan Rawa Tripa, utamanya terkait dengan izin pembukaan lahan Kalista Alam tahun 2011. “Tim sepakat bahwa izin itu cacat hukum,” kenang Irsadi.

Akhirnya, muncul kesepakatan: memberikan mandat kepada Wahana Lingkungan Hidup Aceh untuk menempuh tindakan hukum melawan gubernur. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Perkara hukumnya: izin Kalista Alam cacat hukum dan mesti dicabut.

“Jadi, keluarnya izin baru untuk Kalista Alam pada Agustus 2011 menjadi pintu masuk gugatan. Upaya ini untuk kepentingan lingkungan, kepentingan bersama. Masyarakat juga setuju bahwa harus ada areal di Rawa Tripa yang dijadikan kawasan lindung atau kawasan



Selama 2012-2013, ekosistem Tripa berada di titik nadir. Perkebunan sawit membersihkan lahan dengan membakar segala macam sisa kehidupan rawa gambut. Api merambat ke dalam tanah gambut, dan menjalar ke segala penjuru. Tanah gambut seperti sekam yang dapat menyimpan bara api selama beberapa hari (kiri-kanan).

konservasi. Apapun namanya, entah kawasan lindung ataupun kawasan konservasi. Rawa Tripa memang bukan milik siapa-siapa, tapi milik bersama,” ungkap Teuku Muhammad Zulfikar, Aceh Liasion Officer YEL, yang kala itu memangku sebagai direktur eksekutif Walhi Aceh.

Dia menuturkan, upaya advokasi Tim Koalisi melibatkan banyak pihak. Dalam gugatan hukum itu, Walhi didukung data-data dari BPKEL, YEL, Forum Tata Ruang Sumatera, WWF dan sebagainya. “Semuanya bersatu untuk gerakan advokasi Rawa Tripa. Kolaborasinya cukup mantap.”

Sebelum tindakan hukum itu, Zulfikar mengingatkan bahwa pada Juni 2010 masyarakat membuat Petisi Rawa Tripa, yang diteken 21 gampong di Kemukiman Tripa dan Seuneuam. Petisi ini ditujukan kepada Gubernur Aceh dan Bupati Nagan Raya. Sayangnya, petisi tidak mendapatkan respons. Alhasil, kata Zulfikar, aspirasi masyarakat disalurkan melalui Tim Koalisi.

IZIN perkebunan bagi Kalista Alam itu dipandang menciderai kekayaan hayati Rawa Tripa. Para pegiat lingkungan Aceh juga memandang izin Kalista Alam cacat hukum.





Meskipun terjadi secara lokal di Tripa, dampak pembakaran lahan gambut bersifat global. Kobaran api yang melalap gambut melepaskan karbon ke atmosfer. Karbon merupakan salah satu gas rumah kaca yang menghangatkan suhu bumi (atas). Baru-baru ini, bahkan sisa-sisa kebakaran di masa lalu masih bisa dijumpai di Tripa (inzet kiri).



Setelah lahan bekas Kalista Alam dijadikan kawasan lindung, hutan gambut memulihkan diri. Tanpa campur tangan manusia, dalam jangka panjang Tripa bisa memulihkan diri. Hanya saja, kawasan lindung gambut harus dijaga agar tidak dirambah.

Peran ekologis kawasan ini tecermin dari masuknya Rawa Tripa dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Artinya, Tripa bergelimang keanekaragaman hayati yang semestinya dikelola sesuai kaidah konservasi. Zulfikar mengenang bahwa dokumen analisis dampak lingkungan Kalista Alam tidak sah. “Artinya itu penipuan. Misalnya saja, di dokumen dikatakan ketebalan gambut hanya dua meter. Tapi kenyataannya ‘kan tidak,” imbuh Zulfikar.

Farwiza dan Bakker menjelaskan, sebagai bagian dari KEL, Tripa menjadi Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung



Lingkungan Hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta moratorium konsesi hutan dan lahan gambut.

“Penerbitan izin ini mencemari reputasi Irwandi yang dikenal sebagai “gubernur hijau” dari Aceh,” catat Farwiza dan Bakker. Predikat itu disandang Irwandi kala menerapkan moratorium penebangan dan memulai visi pembangunan hijau di awal masa jabatannya. Tak heran, pemberian izin tersebut melecut kegemparan di kalangan aktivis lingkungan, media nasional dan internasional.

Secara ringkas dan lugas, paparan Farwiza dan Bakker mendudukan ekosistem Rawa Tripa dalam konteks nasional dan global. Konteks global itu bermula dari keinginan Indonesia untuk memberikan sumbangsih dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui upaya mengurangi angka deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus [REDD+]). Skema REDD+ diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi mitigasi perubahan iklim dalam kerangka kerja pasca-Kyoto.

Sejak 2005, Indonesia mulai turut dalam diskusi REDD+, dan semakin terlibat saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFCCC) ke-13 di Bali pada 2007. Farwiza dan Bakker menuturkan bahwa pada konteks internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang bekerja sama dengan donor internasional dalam membangun kebijakan, kerangka kerja, dan implementasi REDD+. Kerjasama yang pertama kali adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Norwegia, melalui Letter of Intent pada 2010. Dalam kesepakatan ini, Norwegia menjanjikan dukungan US\$1 miliar untuk membantu Indonesia dalam mengurangi emisi.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pada 2011, pemerintah meluncurkan moratorium penerbitan izin baru di

hutan primer dan lahan gambut (PIPIB). Lepas dari kontroversi yang berkembang setelah kebijakan itu, Farwiza dan Bakker menegaskan bahwa Tripa termasuk dalam kawasan moratorium yang disepakati Indonesia dan Norwegia. “Tripa ditunjuk sebagai salah satu daerah “terlarang” bagi penerbitan izin baru,” tulis Farwiza dan Bakker.

Dalam pusaran kontroversi yang masih menyelimuti moratorium penerbitan izin baru, Irwandi mendadak menerbitkan izin bagi Kalista Alam. Pendek kata, catat Farwiza dan Bakker, izin Kalista Alam terbit setelah Tripa tercakup dalam kawasan yang terlarang bagi penerbitan izin baru.

Namun, tiba-tiba saja Rawa Tripa dikeluarkan dari peta moratorium melalui revisi pertama. “Inilah yang menyebabkan kecurigaan masyarakat dan aktivis lingkungan yang memprotes penerbitan izin tersebut,” demikian Farwiza dan Bakker.

Ringkasnya, pada Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani moratorium konsesi baru di hutan primer dan lahan gambut. Moratorium atau masa jeda bagi izin perkebunan ini wujud komitmen \$US1 miliar dari pemerintah Norwegia untuk membantu Indonesia mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sayangnya, tak lama setelah itu, pada



Agustus 2011, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyetujui izin konsesi baru untuk Kalista Alam di Tripa yang jelas dilarang untuk pembukaan lahan berdasarkan moratorium itu—yang juga tercakup dalam Kawasan Strategis Nasional.

DALAM CATATAN ‘Flashback Kasus Rawa Tripa’ yang dilansir Tim Koalisi pada 18 April 2012, Ketua Satgas REDD+ Indonesia Kuntoro Mangkusubroto berkirim surat kepada Menteri Kehutanan perihal pembaharuan peta moratorium PT Kalista Alam.

Surat itu menjelaskan kronologi perizinan dan kedudukan areal



Kalista Alam dalam peta moratorium. Kronologinya, pada 25 Agustus 2011, gubernur Aceh menerbitkan izin untuk perkebunan budidaya Kalista Alam seluas 1.605 hektar. Sesuai peta moratorium berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323 pada 17 Juni 2011, Rawa Tripa berada dalam cakupan peta moratorium.

Lalu pada 22 November 2011, areal Kalista Alam tidak masuk dalam peta indikatif moratorium hasil revisi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7416. Pengeluaran areal Kalista Alam berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional yang

Kasus Kalista Alam telah membuka konflik terbuka antar-elemen masyarakat yang pro dan kontra terhadap upaya hukum dari aktivis lingkungan. Konflik seperti ini lazim terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai kaidah konservasi.

LINI MASA TRIPA

Di masa kolonial, pejuang Aceh menjadikan Tripa sebagai tempat persembunyian. Hutan yang rapat menghentikan serdadu Belanda. Itu sepenggal kisah lokal tentang Tripa yang agung dan misterius. Dari masa ke masa, keagungan Tripa sirna. Rawa ini hanya menjadi tempat merajalelanya keserakahan perkebunan sawit. Lini masa berikut menunjukkan benturan kepentingan di Tripa sudah terjadi sejak era 1990-an.

1920-an

Pembukaan kebun sawit NV Socfin (sekarang PT Sofindo) di Nagan Raya.

1934

Pemimpin adat Aceh mendeklarasikan penyelamatan hutan Leuser, yang mencakup Tripa. Deklarasi Tapaktuan ini ditandatangani gubernur Hindia Belanda.

1940-an

Hampir seluruh Tripa ditutupi hutan perawan.

1980-an

PT Cemerlang Abadi membuka kebun sawit di Alue Mirah. Areal konsesi itu terbengkalai hingga 1990-an.

1983

Tata Guna Hutan Kesepakatan 1983: sebagian besar masih berstatus hutan negara bebas atau hutan produksi.

1990-an

- Hutan Tripa masih relatif utuh. Pembangunan jalan Meulaboh-Tapaktuan yang dibangun pada 1980 pun tak membuka kawasan rawa.
- Ada lima perusahaan: Gelora Sawita Makmur, Kalista Alam, Patriot Guna Sakti Abadi, Cemerlang Abadi dan Agra Para Citra. Hal ini bertentangan dengan SK Presiden No. 32/1990: hutan gambut sedalam lebih dari 3 m harus dilindungi dan tak boleh dikonversi jadi lahan budidaya
- Padu-serasi kawasan hutan pada 1995 dan SK Gubernur Aceh No. 19/1999: wilayah Tripa 'bukan kawasan hutan', tapi masih ada 'kawasan lindung di luar hutan'. Artinya, pada masa ini masih ada kesempatan untuk menyelamatkan areal Tripa.

1998

Tripa masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dengan tata kelola konservasi khusus

sesuai Keppres No. 33 Tahun 1998.

1999

Konflik bersenjata mengerem pembukaan lahan. Proses suksesi alami berlangsung.

2000

Menteri Kehutanan menerbitkan SK No. 170/2000 yang menyatakan seluruh kawasan Tripa merupakan areal penggunaan lain (APL).

2001

Terbit SK Menhut No. 190/2001 yang menetapkan batas-batas Kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh.

2001 – 2005

Selama konflik Aceh, kebun sawit tak aktif dan terjadi regenerasi alami. Setelah tsunami dan masa damai, pembukaan lahan dimulai lagi oleh Astra Agro Lestari dan Kalista Alam.

2006

UUPA No. 11/2006 menyatakan mandat pemerintahan Aceh untuk mengatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL): perlindungan, rehabilitasi dan pemanfaatan secara lestari. UUPA menjadi dasar dibentuknya Badan Pengelola KEL, lembaga provinsi untuk melaksanakan mandat itu.

2007

- Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerbitkan instruksi moratorium penebangan hutan di seluruh Aceh.
- Hasil kajian: tersisa 31.410 ha atau 51% dari ekosistem Tripa. Sekitar 17.820 ha berada dalam konsesi perkebunan, dan sisanya 12.573 ha untuk penggunaan lain oleh masyarakat. Hingga akhir 2009, sekitar 8.000 ha telah dibuka kembali.
- Peneliti menguji kedalaman gambut di atas 3 m di sebagian besar lokasi, termasuk areal

konsesi HGU. Di lokasi tertentu melebihi 5 m.

2008

Peneliti menyebut hutan Tripa tersisa 15.595 ha (24%) yang berada di kebun sawit. Sekitar 1.000 ha dibuka dengan pembakaran.

2009

- Kajian lain menyebut perubahan lahan selama 19 tahun (1990-2009) sangat cepat. Hutan Tripa pada 1990 seluas 67.000 ha atau 65% dari total area, namun sampai 2009 hanya tersisa 19.000 ha atau tinggal 18%. Selama itu pula, luas kebun sawit perusahaan dan rakyat meningkat drastis: dari 941 ha menjadi 38.568 ha.

2010

- Warga 21 gampong Kemukiman Tripa dan Seunueam melayangkan petisi kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan bupati Nagan Raya.

2011

- TKPRT merilis petisi kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menyelamatkan Tripa.
- Sebagai bagian kesepakatan REDD+ Indonesia-Norwegia, pemerintah merilis moratorium penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut (PIPIB). Tripa masuk dalam daerah terlarang bagi penerbitan izin baru.
- Izin lokasi Kalista berakhir pada 5 Februari 2011, tapi gubernur Aceh memberikan izin budidaya pada Agustus 2011. Hali ini membuat aktivis lingkungan menggugat gubernur Aceh.
- Walhi Aceh menggugat izin gubernur itu ke PTUN Aceh.
- Tiba-tiba areal Kalista dikeluarkan dari peta moratorium saat revisi PIPIB.

2012

- Petisi Rawa Tripa menuntut Presiden Yudhoyono menegakkan hukum. Dalam semalam, petisi

meraih 10.000 lebih tanda tangan.

- PTUN Aceh menolak gugatan Walhi, lalu banding ke PTTUN Medan.
- PTTUN Medan mengabulkan banding Walhi: gubernur mesti mencabut izin Kalista.
- Sesuai keputusan PTTUN, gubernur Aceh mencabut izin Kalista. Tak terima, Kalista mengajukan kasasi dan menggugat gubernur.
- Keadaan kian buruk: tanpa izin, Kalista terus membuka dan membakar lahan.

2013

- Kalista menang, PTUN Aceh memerintahkan gubernur mencabut surat pencabutan izin perkebunan.
- Mahkamah Agung menolak kasasi Kalista dalam gugatan pencabutan izin oleh gubernur. Dengan demikian, pencabutan izin Kalista oleh gubernur sah dan berkekuatan hukum tetap.
- Bekas lahan Kalista ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut melalui Qanun RTRW Aceh. Sayangnya, qanun ini menghilangkan nomenklatur KEL di Aceh. Warga Aceh menggugat qanun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2014

- Kalista dinyatakan bersalah di pengadilan Meulaboh karena membakar lahan. Denda Rp 336 miliar. Ini kasus perdata pembakaran lahan pertama yang diajukan KLHK. Kalista banding.
- Pengadilan Tinggi Aceh menolak banding Kalista. Perusahaan ini mengajukan kasasi ke MA.

2016

Mahkamah Agung menolak kasasi Kalista. Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh. Vonis pertama dan terbesar sepanjang sejarah kasus pembakaran lahan dan hutan.

SUMBER:

FRAGMENTASI INSTITUSI ATAU KOLABORASI? SEBUAH PELAJARAN DARI TRIPA, ACEH. 2014. FARHAN, F DAN L. BAKKER. DALAM: LAURENS BAKKER & YANTI FRISTIKAWATI (ED). PERMASALAHAN KEHUTANAN DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN IKLIM SERTA REDD+. YOGYAKARTA: POHON CAHAYA, 2014. **KEMENANGAN KECIL DI RAWA TRIPA**. CATATAN TEUKU MUHAMMAD ZULFIKAR. **KILAS BALIK ADVOKASI RAWA TRIPA**. IRSADI ARISTORA, JUBIR TKPRT & FOR-TRUST, TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA. ARSIP POWERPOINT TKPRT. **LAPORAN SURVEI LAPANG RAWA GAMBUT TRIPA** (KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DAN NAGAN RAYA, ACEH, INDONESIA). 2015. PENYUSUN: MATTHEW G. NOWAK. 2015. **YAYASAN EKOSISTEM LESTARI**, PANECO FOUNDATION, TFCA SUMATERA, SOCP. **ORANGUTAN DAN EKONOMI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI SUMATERA**. 2011. EDITOR: SERGE WICH, RISWAN, JOHANN JENSON, JOHANNES REFISCH DAN CHRISTIAN NELLEMAN. ALIH BAHASA: GUNUNG GEA. UNEP/GRASP/PANECO/YEL/ICRAF/GRID-ARENDAL.

Tak hanya konflik antar-manusia, pembukaan rawa gambut Tripa juga memicu perseteruan antara manusia dengan satwa. Yang kerap terjadi: orangutan diburu, ditangkap dan dipejara. Atau sebaliknya: orangutan menggerayangi kebun masyarakat. Bayi orangutan ini diselamatkan dari tangan seorang warga di Pantan Cut, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya.

menyatakan di lokasi itu terdapat hak guna usaha (HGU) yang sejatinya belum ada HGU.

Lantas, pada awal April 2012, Satgas REDD+ menggelar investigasi lapangan yang menemukan Kalista Alam telah memperluas arealnya 1.605 hektar. Ternyata, di areal perluasan itu Kalista Alam belum memiliki izin HGU. "Kalista Alam hanya memiliki izin lokasi dari bupati Nagan Raya, yang berlaku selama tiga tahun dan berakhir pada 5 Februari 2011," catat Tim Koalisi.

Izin lokasi sejatinya untuk syarat mendapatkan izin usaha perkebunan budidaya dan hak guna usaha bukan untuk membuka ataupun perluasan lahan. Badan Pertanahan Nasional membenarkan temuan ini. Bahkan tim investigasi lapangan menemukan sebagian lahan perluasan Kalista Alam telah ditanami sawit. Sebagian lagi telah siap ditanami, dan sebagian besar masih berhutan.

Artinya, ada yang janggal: setelah izin lokasi perusahaan berakhir pada Februari 2011, Gubernur Irwandi baru menerbitkan izin budidaya pada Agustus 2011. Secara hukum, tanpa perpanjangan izin lokasi, gubernur tidak bisa memberikan izin usaha perkebunan kepada Kalista Alam. Sementara di lapangan, Kalista Alam telah melakukan pembukaan lahan kendati belum memiliki izin perkebunan budidaya.

Sesuai dokumen upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) Kalista Alam, sebagian besar wilayah perkebunan merupakan lahan bergambut. Surat Ketua Satgas REDD+ tersebut juga meminta Menteri Kehutanan untuk meneliti masalah Kalista Alam, dan menetapkan arealnya dimasukkan lagi dalam peta moratorium.

Menanggapi surat Satgas REDD+, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyatakan bahwa verifikasi dari Badan Pertanahan Nasional tentang perluasan Kalista Alam ternyata belum mengantongi izin HGU. Surat Dirjen Planologi menyatakan ada perbedaan antara data Kementerian Kehutanan dari Badan Pertanahan Nasional saat menyusun peta indikatif moratorium revisi pertama, dengan data BPN yang diberikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Atas dasar itu, Dirjen Planologi meminta klarifikasi ulang terhadap seluruh data dan informasi tentang perizinan dari BPN dalam peta revisi pertama, utamanya terhadap areal perluasan Kalista Alam, sebagai bahan peta indikatif moratorium revisi kedua.

Dari kronologi di atas, Tim Koalisi berpendapat ada dualisme perizinan, yaitu dari Badan Pertanahan Nasional dan gubernur Aceh. Padahal Rawa Tripa





Hutan rawa yang relatif bagus sangat sulit ditembus. Rapatnya vegetasi menjadi benteng alami tanpa tanding dalam menjaga daerah pesisir. Hutan nan rapat inilah yang dibuka perkebunan sawit menjadi lahan gundul. Ketebalan gambut di Tripa lebih dari tiga meter yang wajib dilindungi dan dijaga.

merupakan daerah moratorium atau jeda bagi penerbitan izin baru dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin yang lantas dikeluarkan dari peta moratorium.

DI SEBUAH kedai kopi di Meulaboh, Irsadi Aristora membongkar arsip-arsip Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa yang mengendap di komputer jinjingnya. Ia lantas menyodorkan salah satu arsip tentang intimidasi yang dialami sebagian masyarakat yang mendukung pelestarian Tripa. Tekanan dan intimidasi psikologis adalah kisah lain di luar gerakan penyelamatan Rawa Tripa.



Lelaki yang banyak berkiprah di Transparency International-Indonesia ini pernah melansir siaran pers tentang perlakuan pihak ketiga terhadap para pendukung penyelamatan Rawa Tripa. Sebagai juru bicara Tim Koalisi, saat itu Irsadi menuturkan tekanan yang dialami para aktivis yang bekerja di lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tim Koalisi.

“Kita selalu melakukan rapat evaluasi yang dihadiri anggota Tim Koalisi Penyelamat Rawa Tripa,” katanya. Dari forum itulah terungkap adanya tekanan pihak ketiga. Salah satu intimidasi dihadapi Ibdueh, salah seorang anggota

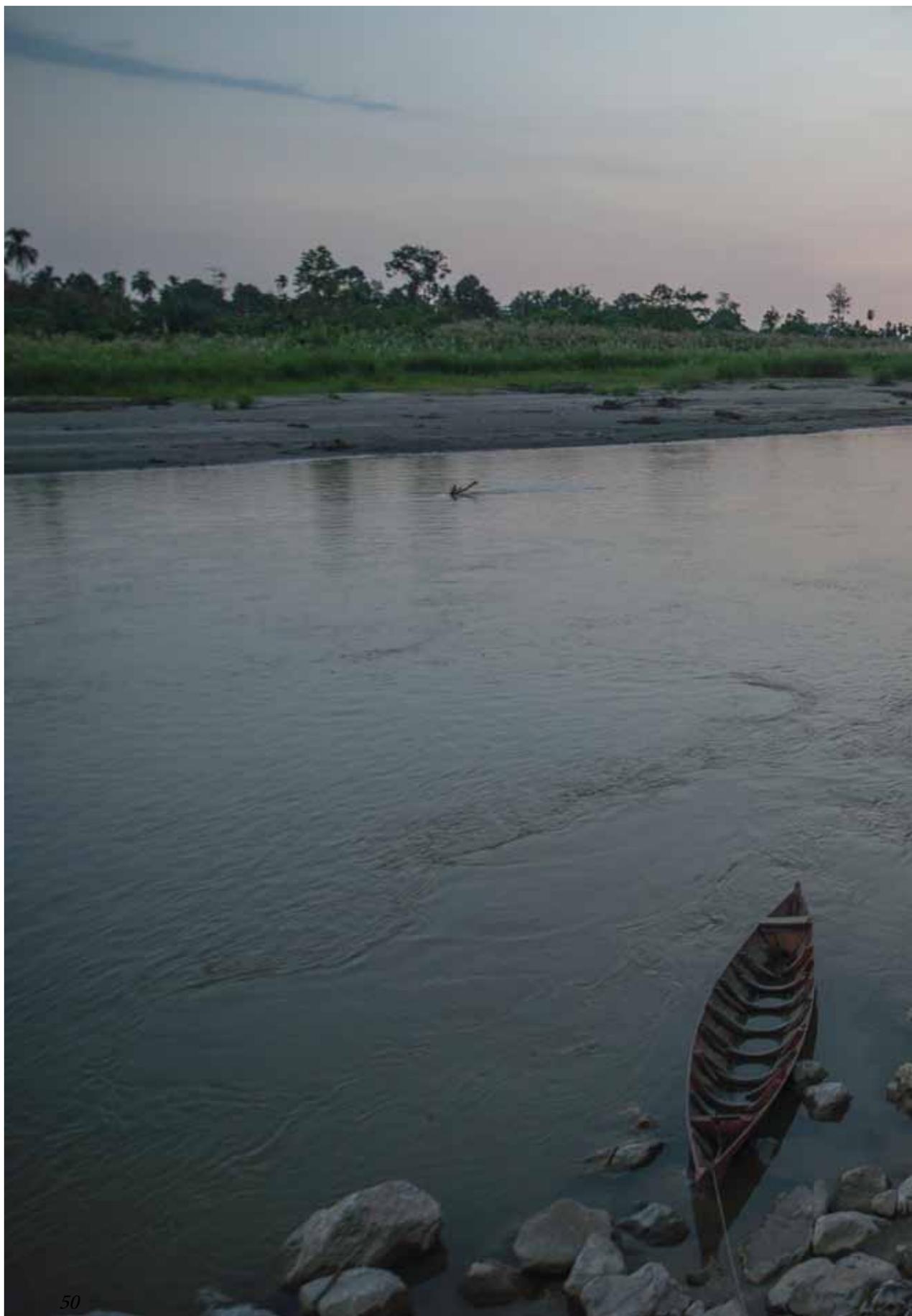
masyarakat yang melaporkan tindak pidana di Rawa Tripa ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada 2011.

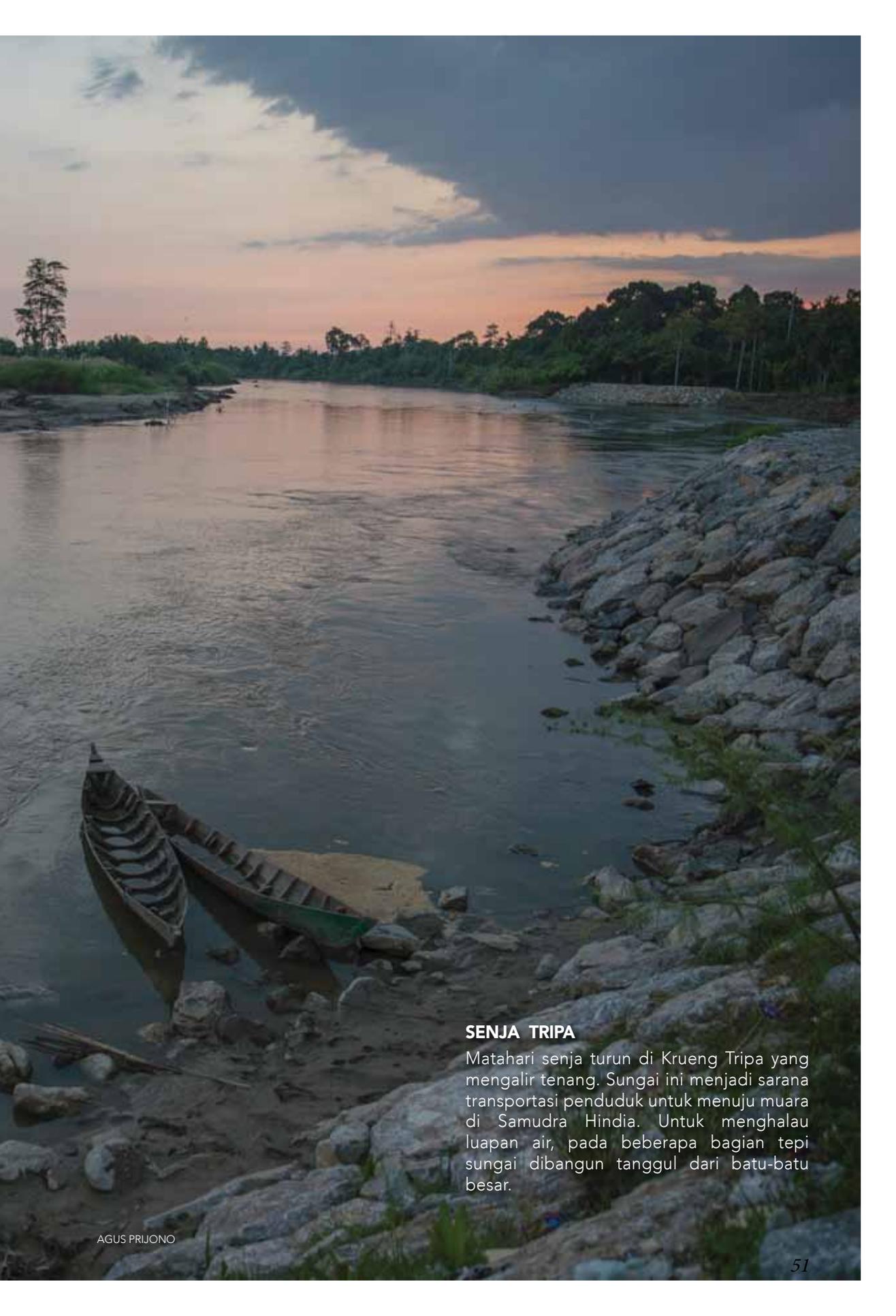
Tekanan terhadap Ibdueh dilakukan oleh pihak ketiga melalui sambungan telepon. Seseorang yang mengaku aparat kepolisian menginterogasi Ibdueh. “Tak hanya itu, Komandan Rayon Militer Kecamatan Darul Makmur juga menginterogasi Ibdueh tentang laporannya ke Mabes Polri,” catat Irsadi.

Kisah yang dipaparkan Irsadi itu hanya sekelumit dari pergulatan masyarakat sipil dalam melestarikan Rawa Tripa. Di sela-sela pertarungan yang rumit, upaya mencari dukungan juga menjangkau dunia maya. Para pegiat lingkungan melansir petisi di Change.org untuk mencari dukungan lebih luas yang melampaui batas-batas negara. Petisi daring ini menyebar luas. Koalisi masyarakat sipil menggalang petisi itu untuk menggerakkan pemerintah Aceh mencabut izin Kalista Alam. Dukungan bagi petisi bertajuk ‘*Enforce the law protecting Tripa peat swamp and it’s orangutan population*’ ini hampir menembus 16 ribu pendukung dari dalam maupun luar negeri.

SEMENJAK melayangkan gugatan, kasus Rawa Tripa memasuki babak baru dalam pergulatan hukum. Zulfikar menuturkan mandat yang diampun Walhi-Aceh dikawal oleh berbagai eksponen masyarakat. “Kita kawal. Ini bukan hanya untuk kepentingan LSM, tapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan global,” tutur Zulfikar.

Dia juga membuat catatan kecil tentang dinamika persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Melalui legal standing Walhi-





SENJA TRIPA

Matahari senja turun di Krueng Tripa yang mengalir tenang. Sungai ini menjadi sarana transportasi penduduk untuk menuju muara di Samudra Hindia. Untuk menghalau luapan air, pada beberapa bagian tepi sungai dibangun tanggul dari batu-batu besar.



Aceh, masyarakat menempuh jalur hukum melalui mekanisme gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, karena Gubernur Aceh telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kalista Alam.

Dalilnya, ungkap Zulfikar, keputusan gubernur Aceh itu melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Tuntutannya: surat keputusan gubernur Aceh secara substansial mengabaikan dan bertentangan dengan integrasi teritorial kawasan hutan rawa Tripa.

Atas gugatan itu, PTUN Banda Aceh berpendapat bahwa Walhi-Aceh dan gubernur Aceh belum optimal dalam menempuh upaya penyelesaian secara administratif. Pengadilan Tata Usaha

Negara Aceh menafsirkan bahwa perkara ini sebagai sengketa lingkungan hidup bukan sengketa tata usaha negara.

Walhi-Aceh menolak putusan itu, yang lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Dalam memori bandingnya, Walhi-Aceh menyebutkan perkara ini sebagai sengketa tata usaha negara, bukan sengketa lingkungan hidup. “Sementara Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh mengalihkan isu dari sengketa tata usaha negara menjadi isu lingkungan hidup,” tulis Zulfikar.

Setelah membaca memori banding, kontra-memori banding, berkas-berkas perkara, Pengadilan Tinggi Medan lantas menguji kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan gubernur Aceh atas Kalista Alam. “Akhirnya, dari pengujian



Saat kasus Kalista Alam di titik didih, tarik-menarik kepentingan menyeret berbagai pihak ke dalam dua kutub yang saling bertentangan: melindungi atau mencampakkan rawa Tripa. Ajang pertemuan menjadi panggung perdebatan. Akhirnya, solusi ada di ranah penegakan hukum (kiri). Meski begitu, tetap saja ada yang mengaku-aku lahan di bekas areal Kalista Alam (atas).

tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan banding Walhi-Aceh,” ungkap Zulfikar.

Amar putusannya, antara lain, batalnya surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya bagi Kalista Alam. Pengadilan Tinggi Medan juga memerintahkan Gubernur Aceh untuk mencabut izin Kalista Alam.

Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Gubernur Aceh mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kalista Alam dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor

525/BP2T/5078/2012.

Keputusan gubernur itu juga menimbang Kalista Alam yang belum membangun kebun plasma masyarakat dan tidak menyampaikan laporan perkembangan fisik usaha secara berkala setiap enam bulan kepada pemerintah.

Kalista Alam rupanya tak menerima putusan banding. Selaku pihak tergugat intervensi, Kalista Alam menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan itu. Sekalipun mengajukan kasasi, gubernur Aceh pada 12 September 2012 telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Medan, dan mencabut izin usaha perkebunan Kalista Alam.



PARADOKS DI LEUSER

Farwiza Farhan memoleskan spidol merah ke atas peta Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa. "Di sini (Tripa) dilindungi. Tapi, KEL (Kawasan Ekosistem Leuser) dihilangkan. Wusss....," katanya sembari menyapukan telapak tangannya ke sisi Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh.

Hari itu, di kantor Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Banda Aceh, Farwiza menunjukkan sebuah paradoks: pemerintah Aceh menetapkan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa, pada saat yang sama meniadakan nomenklatur KEL dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Kawasan lindung hanya seluas 11.000 hektar, KEL di Aceh seluas 2,25 juta hektar.

Pemerintah Aceh berbuat aneh: melindungi yang kecil, meniadakan yang besar. Lagipula, kedua kawasan itu sebenarnya tak bisa saling dipisahkan,

karena kawasan lindung gambut berada dalam cakupan KEL.

Ketua Yayasan HAKA ini memaparkan penghilangan nomenklatur KEL dalam qanun, atau peraturan daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah Aceh untuk mengelola KEL sesuai kaidah konservasi. Artinya, tidak adanya nomenklatur KEL berarti pemerintah Aceh telah mengabaikan mandatnya. Qanun juga bertentangan dengan undang-undang rencana tata ruang wilayah nasional, yang menetapkan ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk fungsi perlindungan lingkungan.

Tak mengherankan, qanun RTRW Aceh menggelisahkan para aktivis lingkungan. Apalagi Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa, yang juga ditetapkan dalam

qanun RTRW, juga tercakup dalam KEL. Kegelisahan makin merebak karena KEL diincar dan dijejali banyak kepentingan: konversi kawasan hutan, perambahan, penebangan liar. "Sekarang saja ada perambahan lahan di KEL," papar Farwiza.

Kawasan Ekosistem Leuser membentang di Provinsi Sumatra Utara (384 ribu hektar) dan Aceh. Kawasan seluas total 2,6 juta hektar ini bergelimang kekayaan alam dengan hutan tropis yang terjaga. Sebagian wilayahnya dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

Ekosistem Leuser memang berbeda dengan kawasan konservasi yang dilindungi, namun kawasan ini membentuk satu kesatuan ekologis: daerah aliran sungai dan hamparan hutan hujan tropis Sumatera. Di ekosistem ini hidup mamalia besar Pulau Sumatera yang rentan punah: gajah, orangutan, harimau, tapir.

Ikhtiar dan niat tulus untuk melindungi ekosistem Leuser punya sejarah panjang. Pada 1920-an, para tokoh adat Aceh mendeklarasikan perlunya perlindungan Leuser, yang juga mencakup Tripa. Selanjutnya, melalui Keppres Nomor 33 Tahun 1998, pemerintah menetapkan wilayah ini sebagai Kawasan Ekosistem Leuser dengan tata kelola konservasi. Lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRW nasional menyatakan ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk fungsi lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pemerintah Aceh mengemban amanat pengelolaan KEL: perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Di ekosistem Leuser pula, pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin perusahaan hutan. Keadaan makin ironis. Pada 12 Februari

2014, gubernur Aceh menandatangani aturan baru: Nomor 5 tahun 2014 yang menguraikan prosedur dan panduan untuk memperoleh izin baru di Ekosistem Leuser di wilayah Aceh.

Bahkan pemerintah Aceh merencanakan revisi sebagian zona inti Taman Nasional Gunung Leuser untuk pengembangan potensi geotermal. Rencana ini akan merevisi zona inti menjadi zona pemanfaatan untuk izin eksplorasi PT Hitay Panas Energi. Untungnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak rencana revisi zonasi itu.

Ringkasnya, ada dua langkah mundur: bermula dari qanun RTRW yang tanpa substansi KEL, lalu ada aturan tentang tata cara izin baru di ekosistem Leuser. Apapun alasannya, pemerintah Aceh telah mengabaikan mandat itu.

Lantaran itu, Farwiza bersama sejumlah warga Aceh berhimpun dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap qanun RTRW Aceh. Gugatan warga itu dilayangkan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menteri Dalam Negeri digugat karena lalai tidak membatalkan Qanun RTRW Aceh yang tidak mencantumkan KEL. Sementara itu, Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipandang mengesahkan qanun yang tidak memuat substansi krusial sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, eksponen warga Aceh menjalani sidang menggugat Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh. Ini satu lagi pergulatan yang menentukan nasib KEL yang melingkupi Rawa Tripa.***



Akar-akar yang tersingkap membuktikan tanah gambut telah turun beberapa sentimeter. Pembakaran makin mempercepat turunnya gambut dalam satu dasawarsa. Prosesnya sama dengan sekam yang terbakar dan menjadi abu. Parahnya, Tripa tak jauh dari Samudra Hindia, yang ombaknya bisa menggerus gambut dengan cepat.

Usai melalui pergulatan di meja hijau, pada akhirnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Kalista Alam. Dengan demikian, keputusan gubernur Aceh mencabut izin perkebunan Kalista Alam bernilai sah dan berkekuatan hukum tetap.

“Putusan Pengadilan Tinggi Medan atas kasus Kalista Alam merupakan kemenangan kecil terhadap perlawanan ekspansi sawit yang menggerus kawasan hutan. Semangat kita melindungi ribuan hektar lahan gambut yang tebal. Kita berharap itu bisa dipulihkan, dan kita tidak bicara menolak perkebunan sawit. Lembaga swadaya masyarakat tidak

bicara menolak sawit,” papar Zulfikar. “Artinya, dari sisi ekonomi jika ada wilayah yang mau dijadikan kebun sawit, ya monggo. Mungkin sawit menjadi komoditas andalan pemerintah, ya silahkan. Tapi tolong, ada lahan Tripa yang juga dipertahankan untuk melestarikan keanekaragaman hayati.”

Zulfikar memetik pembelajaran dari kasus Tripa. “Gerakan organisasi nonpemerintah tidak akan jalan tanpa kolaborasi dan kesepahaman yang baik. Itu pembelajarannya. Ada pola-pola gerakan bersama. Ada yang mendukung di tingkat akar rumput; ada yang main di baris depan; ada juga di media massa. Itu



satu sinergi. Semangatnya sama: untuk perlindungan lingkungan.”

Irsadi menuturkan, hikmah dari gerakan di Rawa Tripa justru terasa saat dia berkiprah di Riau. “Jujur, hikmah itu baru saya rasakan di Riau. Pada saat saya membawa keluarga ke Riau, asap kebakaran tebalnya minta ampun,” tutur lelaki yang pernah bergiat di Transparency International Indonesia di Riau ini.

Keluh kesah itu dia tuangkan dalam artikel Adakah Unsur Ingin Membinasakan Warga Riau’ di situs media warga kompasiana.com. “Jadi, ada hikmahnya, seperti itulah risiko kebakaran di lahan

gambut.” Tak mampu menanggung beban risiko kesehatan, Irsadi memboyong kembali keluarganya ke Aceh.

KEMENANGAN hukum itu memberikan angin segar bagi pelestarian Tripa. Kendati begitu, di sela kisah muram Tripa, pada 2012, Yayasan Ekosistem Lestari bersama Tropical Forest Conservation Action-Sumatera melakukan upaya konservasi skala besar di rawa gambut ini. Upaya ini memadukan tiga program yang saling berkaitan: penelitian gambut, pemberdayaan ekonomi lokal, penyadartahuan dan rehabilitasi lahan gambut.

Selama survei, situasi Tripa sedang hangat. Meski pencabutan izin PT Kalista Alam oleh Gubernur Aceh telah terjadi pada 2012, perusahaan sawit itu kembali tertimpa masalah hukum: dituduh membakar lahan. Sialnya, panasnya pergulatan di pengadilan itu merembet ke lapangan.

Apapun yang terjadi, tim YEL tetap menggelar penelitian gambut untuk mendukung upaya pelestarian Tripa. Yayasan Ekosistem Lestari menggelar survei selama Juni 2013 sampai Maret 2014 di rawa gambut Tripa. Kendati berbagai pihak telah mengkaji dan memetakan lapisan gambut di kawasan ini, penelitian kali ini ingin menyajikan pemahaman yang terang tentang ekosistem Tripa.***



ORANGUTAN TERJEBAK

Entah berapa kali Yayasan Ekosistem Lestari menyelamatkan orangutan yang terjebak di habitat yang dikoyak oleh ekspansi perkebunan sawit. Sebagai satwa penjelajah tajuk, orangutan memerlukan pohon-pohon tinggi untuk berpindah tempat. Sayangnya, pembukaan hutan gambut telah memusnahkan pohon tinggi. Evakuasi yang satu ini terjadi di Desa Merkati Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Nagari Raya.





MENGUTIP GAMBUT

Dengan alat bor ini, tim Yayasan Ekosistem Lestari mencuplik sampel gambut Tripa. Dari penelitian ini, tersingkap kedalaman gambut Tripa lebih dari 3 meter. Artinya, ekosistem ini wajib dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan budidaya.

MENYINGKAP GAMBUT TRIPA

MENEMBUS MEDAN BERAT, MENGENDAP-ENDAP DI JALUR
TIKUS, LALU MENCUPLIK GAMBUT, UNTUK MENEGASKAN NILAI
EKOSISTEM TRIPA. TANPA TINDAKAN PERLINDUNGAN, BENCANA
EKOLOGIS MENGHADANG DI MASA DEPAN.

Hari masih pagi. Namun hawa hangat telah menyelimuti kebun-kebun sawit. Para pekerja bertelanjang dada untuk mengusir udara panas. Pohon sawit tumbuh miring, batangnya melengkung. Itu menandakan sawit tumbuh di lahan gambut.

Hawa sejuk nampaknya tak pernah hinggap di Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Sepanjang hari hingga malam, hawa panas membekap wilayah yang bergelimang gambut itu.

Indrianto bersama Syawaludin menembus jalan-jalan tanah yang dikepung sawit. Kendaraan roda empat yang mereka tumpangi merambat pelan. Jalan tanah itu hanya cukup untuk satu kendaraan.

Hari beranjak siang, arus hangat makin meruap dari tanah gambut. Beberapa penduduk Tripa memboyong tandan-tandan sawit dengan sepeda motor.

Pada satu titik, di tikungan kebun sawit yang sempit, pria yang kerap disapa Anto itu berhenti. Dua aktivis Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) ini lantas memboyong peralatan pengebor gambut. Alat ini terdiri dari beberapa tongkat logam, yang bisa

disambung hingga delapan meter. Mata bor berupa sebilah 'tombak logam', yang bisa mencuplik lapisan gambut di bawah permukaan tanah.

Mereka merangsek di kebun sawit masyarakat dan semak belukar. Di hutan kecil yang masih lumayan rimbun, Indrianto berhenti. Benturan logam alat bor memecah kesunyian hutan yang berada di lahan masyarakat itu.

Peluh membasahi wajah dan tubuh kedua pegiat Yayasan Ekosistem Lestari itu. Nyamuk berdenging, berpesta pora menyesap darah. "Ada musang....," tutur Indrianto saat aroma pandan mengambang di udara tanda ada musang. Dia menelisik pepohonan. Namun dalam kerimbunan tajuk pohon, mata awas Indrianto justru menemukan sarang orangutan. Hutan kecil yang nampaknya tak lama lagi bakal menjadi kebun itu menyimpan jejak-jejak



Tanah gambut yang terjaga selalu dalam keadaan lembap. Berperan sebagai pengikat air, gambut menjaga iklim mikro tetap sejuk dan nyaman. Sebaliknya, sekali dibuka, gambut akan cepat melepas air dan mengering seperti spon. Pengeringan dalam skala besar untuk kebun sawit dilakukan dengan membangun kanal.

keanekaragaman hayati Rawa Tripa.

Di sela-sela vegetasi yang rimbun, di atas tanah yang lembap, Indrianto dan Syawaludin menata alat bor. Mereka merangkai tangkai-tangkai logam ke mata bor. Kini, panjang alat bor itu mencapai sekitar 3,5 meter.

Di satu titik, mereka menusukkan bilah bor ke dalam tanah. Bilah bor menembus tanah lembap. Mudah dan ringan. Tapi, ujung pembor mandek. “Kena kayu,” ujar Syawaludin, dengan napas satu-satu.

Belum satu meter menembus tanah, mereka mengangkat kembali mata bor. Tanah yang lembap mencengkeram

bilah bor. Untuk mengangkatnya perlu tenaga ekstra: menahan napas, lalu tenaga mengendap di perut dan pinggang. “Sakitnya di sini...,” kata Indrianto, yang juga Koordinator Lapangan Proyek Tripa, sembari meraba pinggangnya.

Titik bor bergeser beberapa jengkal. Lagi-lagi mandek, terhalang kayu. Diangkat lagi, bergeser lagi. “Bayangkan, kalau bor sudah masuk empat meter, lalu mentok kena kayu. Mengangkatnya berat, dan harus bergeser titik.”

Pada titik ketiga, mata bor dengan mudah menembus tanah tanpa halangan. Mereka lalu memutar pembor agar bilah

Pada titik yang telah ditentukan, mata bor ditancapkan sampai mencapai tanah mineral. Di bagian tertentu di Tripa, kedalaman gambut ada yang lebih dari 8 meter, sehingga mata bor tak bisa menjangkau lapisan tanah mineral.

bor meraup lapisan tanah gambut di kedalaman satu meter.

Dengan kekuatan penuh, mereka mencabut bor. Napas tertahan, tenaga menyentak pinggang. Setelah mencabut pembor, napas mereka menyembur lega. Keringat makin membasahi badan.

Indrianto membuka bilah bor yang telah mencuplik tanah gambut berbentuk silinder. Di lokasi ini, tebal gambut tak sampai satu meter. Pada cuplikan tanah gambut itu, pada kedalaman beberapa sentimeter terdapat warna abu-abu. "Itu mungkin abu," ujar Indrianto, dan menduga, "mungkin di masa lalu pernah kebakaran di lahan ini." Beberapa repihan kayu dan ranting turut masuk dalam sampel gambut: lunak seperti gabus.

PADA SIANG yang lembap dan hangat itu, Indrianto dan Syawaludin seperti mengulang kembali pekerjaan besar Yayasan Ekosistem Lestari dalam membuktikan ketebalan gambut Rawa Tripa.

Selama Juni 2013 sampai Maret 2014, mereka bersama tim lapangan YEL menjelajahi sudut-sudut Tripa untuk memetakan lapisan gambut. Bersama Tropical Forest Conservation Action-Sumatera, penelitian YEL dan mitranya ingin menyajikan pemahaman yang terang-benderang tentang ketebalan rawa gambut Tripa. "Selama ini banyak orang bilang ketebalan gambut Tripa

tidak sampai tiga meter," kata Indrianto. Pendapat tanpa dasar ilmiah itu biasanya berasal dari perusahaan atau pihak lain yang berhasrat merombak Rawa Tripa menjadi perkebunan sawit.

Angka tiga meter dipandang sebagai batas tanah gambut bisa diolah dan dirombak menjadi perkebunan sawit. Batas ini ditentukan tanpa dasar kajian yang memadai. Tiga meter juga menjadi dalih bagi siapa pun untuk membongkar gambut, dan dikelola menjadi perkebunan, pemukiman ataupun pertanian. Berbeda dengan pandangan itu, Yayasan Ekosistem Lestari menetapkan kedalaman setengah meter sebagai petunjuk lapisan gambut layak dilindungi. (Lagipula, tanpa kajian gambut, para pegiat konservasi telah lama memahami Rawa Tripa menjadi habitat orangutan sumatera satu-satunya kera besar di Sumatera. Sudah semenjak era 1990-an, Rawa Tripa tercakup dalam Kawasan Ekosistem Leuser: wilayah yang menjaga ekologi Sumatera.)

Studi ini akan menyajikan pemahaman rinci tentang rawa gambut Tripa, serta nilainya bagi kepentingan lokal, nasional dan global. Kajian ini bakal menambah khazanah pengetahuan umum tentang hutan rawa gambut di Indonesia, yang dapat digunakan pemerintah di semua tingkatan dalam mengelola rawa rambut, perencanaan tata ruang, analisis kepekaan lingkungan.

Sebenarnya sudah banyak pihak yang





mengkaji lapisan gambut Rawa Tripa. Hanya saja, hasilnya belum mampu meyakinkan para pihak-pihak lain terutama perkebunan sawit. Lantaran itulah, YEL meneliti rawa gambut Tripa secara rinci untuk mengetahui batas-batas lahan gambut yang tersisa, ketebalan gambut, sifat tanah di berbagai tipe penutupan lahan, tingkat gangguan, serta perkiraan cadangan karbon di bawah permukaan. Selain itu, kajian ini diharapkan juga memberikan sumbangsih bagi upaya konservasi dan rehabilitasi Rawa Tripa pada saat ini dan masa datang.

Survei lapangan lantas digelar. Indrianto menuturkan, semula penelitian direncanakan selama tiga bulan. Namun keadaan lapangan dan medan yang berat membuat rencana itu berubah. “Jadinya hampir satu tahun,” kenangnya.

Maklum, selama survei, isu Rawa Tripa sedang menghangat. Kendati pencabutan izin PT Kalista Alam oleh Gubernur Aceh telah terjadi pada 2012, perusahaan sawit itu kembali tertimpa masalah hukum. Kalista Alam dituduh membakar lahan. Kasus ini dimenangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Panasnya pergulatan di pengadilan itu merembet ke lapangan.

Jadi, tidak mudah bagi tim lapangan YEL untuk mencuplik tanah gambut di Rawa Tripa. Hampir seluruh akses ke kawasan ini harus melalui jalan-jalan perkebunan sawit. Benturan tak terelakkan.

Wilayah gambut yang dikaji YEL berdasarkan lapisan citra penutupan hutan Tripa tahun 1989. Ini adalah citra satelit pertama dari Tripa. “Selain itu, ditambahkan pula daerah sabuk



Lantaran menjelajahi seluruh ekosistem Tripa, tim survei menjumpai berbagai fenomena di lapangan. Tim menemukan pembukaan kanal besar-besaran di areal PT Surya Panen Subur 2 dekat Kreung Mueling (kiri). Tim juga menemukan jalur pembalakan liar di Suak Bugis di pedalaman hutan rawa Tripa (atas). Artinya: Tripa benar-benar di bawah tekanan.

penyangga 1 kilometer di sekeliling tepi hutan,” papar Indrianto.

Wilayah fokus kajian berada di antara Sungai Batee dan Sungai Tripa untuk memastikan bahwa setiap blok hutan membentuk satu poligon yang tidak terputus. Poligon ini terpotong Sungai Batee di batas timur, Sungai Tripa di batas barat, dan garis pantai Samudra Hindia di batas selatan. Batas utara dari wilayah kajian berupa 1 km sabuk penyangga dari citra penutupan hutan 1989.

Indrianto bersama tim mesti mencuplik contoh lapisan gambut di 82 titik yang tersebar di Rawa Tripa. Titik-

titik pengambilan sampel itu tersebar di hutan, perkebunan, dan transisi kebun dengan pemukiman. Itu juga berarti, dia akan melewati perkebunan sawit yang sedang memasang alarm waspada terhadap pegiat YEL ataupun aktivis lingkungan yang lain.

“Saya yakin waktu itu, bukan pesimis, masuk ke Rawa Tripa melalui pintu resmi (perusahaan) tidak akan bisa. Tapi kajian ini penting, karena belum ada kawasan gambut di Indonesia yang punya data lengkap,” tutur Indrianto.

Dia mengisahkan pernah mencoba melalui pos-pos keamanan perusahaan



Beratnya medan memaksa tim beristirahat di mana saja. Kali ini, tim pembor beristirahat di wilayah yang berdekatan dengan Suak Bugis. Untuk memasak dan menyeduh kopi, tim menangguk air dari lahan gambut yang cokelat dan masam. “Tak apa-apa,” kata Indrianto.

untuk masuk ke Tripa. “Tidak dilarang, dipersilakan masuk. Tapi, di tengah jalan melintang bak truk. Bagaimana kami bisa masuk...,” sergahnya.

Untuk menembus daerah kajian, Indrianto akhirnya memilih jalan ‘tikus’. “Kadang-kadang kita harus jalan malam-malam. Membawa bekal, membawa sampel gambut pula.”

Tim lapangan ini tak banyak: hanya empat sampai lima orang. Beban perbekalan di bagi rata. Ada alat pengebor, beras, lauk-pauk, kopi, kacang hijau, dan sebagainya. “Kita selalu membawa kacang hijau. Penting untuk memulihkan energi



tubuh,” jelas Indrianto.

Untuk mengangkut segala kebutuhan itu, Indrianto dan tim tidak membawanya dengan tas punggung. “Dengan karung di punggung. Kalau memakai tas punggung yang besar, ketahuan kita...”

Indrianto menuturkan, untuk memperoleh akses masuk ke wilayah kajian, tim berbekal peta kawasan. “Kita lihat posisi pos perusahaan di mana. Kalau ada pos, berarti kita harus lewat kebun masyarakat.”

Namun kegalauan menghinggapi anggota tim. Melewati perkebunan masyarakat juga tak gampang. “Kawan-

kawan takut, nervous kalau bertemu orang. Kalau takut, asam lambung bisa naik...,” kelakarnya.

Penelitian lapisan gambut ini akhirnya campuran antara kerja senyap, menguras energi dan memutar akal. Apa boleh buat! Kasus hukum yang menimpa perusahaan sawit membuat pihak keamanan diselimuti kecurigaan apalagi terhadap staf lapangan YEL.

Lantaran itulah, seringkali Indrianto dan tim tidak berangkat dari kantor lapangan YEL di Darul Makmur, Nagan Raya. “Kita kadang tidak berangkat dari kantor, kami khawatir ketahuan. Kita punya pengalaman, pergi ke lapangan selalu ada saja yang melihat, dan menelepon sekuriti perusahaan sawit.”

Setelah berbagi beban perbekalan, tim lapangan baru masuk pukul tiga sore. “Kita mengendap dulu, berteduh di kebun-kebun masyarakat. Agak sore sedikit, saat orang yang bekerja di perusahaan telah pulang, kita bisa leluasa berjalan. Di samping itu, kita menghindari cuaca panas.”

Perjalanan ke titik-titik pencuplikan gambut memang penuh dinamika. Selama menjelajahi sudut-sudut Tripa, tim YEL berhadapan dengan kondisi yang penuh kejutan. Pada suatu waktu, Indrianto yang baru keluar dari kebun warga terhadang hamparan gambut yang terbakar. Kebakaran itu disulut oknum masyarakat yang merambah lahan. Selain

harus menembus lahan yang penuh bara dan jerebu, melewati api yang melahap lahan di perbatasan perkebunan PT Surya Panen Subur itu punya risiko lain.

“Kami lari tunggang langgang. Kenapa? Kalau ketahuan ada di situ, kita ditangkap, dan tahu dari YEL, bisa dituduh melakukan pembakaran. Saat itu, sidang pengadilan kasus kebakaran Kalista Alam sedang hangat-hangatnya.”

Kawasan Rawa Tripa yang telah dibuka ditumbuhi pakis dan paku-pakuan. Untuk menembusnya juga tak gampang. Di hutan yang tak lagi utuh, tim harus menerabas semak belukar. “Memang tidak berduri, tapi tumbuhannya tebal. Kita tebas pun lama, susah dan memakan waktu. Kalau menebasnya terlalu lama, kita khawatir dilihat orang perusahaan. Mampus kita. Jadi, semboyan kami saat masuk ke Rawa Tripa: hindari masalah sejauh mungkin walaupun itu sulit. Tapi kalau sudah terbentur masalah, kita hadapi saja.”

MEDAN yang berat, dan melalui jalur tikus, membuat gerak maju tim teramat lambat. Dalam satu hari, Indrianto dan rekan kerjanya hanya mampu mengambil sampel di tiga sampai empat titik. “Paling hanya sanggup tiga titik,” ungkap Indrianto.

Di lapangan, tim akan menginap selama sepekan. Selain dibatasi logistik, makin lama di lapangan berarti beban



sampel juga semakin banyak. Indrianto menuturkan, setelah mencuplik, sampel gambut akan disimpan, lalu dibawa pulang. Jumlah sampel gambut ini juga tergantung pada kedalaman lapisan gambut. Makin tebal, makin banyak tanah gambut yang mesti dibawa keluar hutan. Sampel-sampel ini dikumpulkan, lalu dianalisis di laboratorium. “Kita ambil sampel, lalu dikasih tanda dan nomor, dicatat, lalu disimpan,” katanya.

Tentu hal itu berbeda dengan pendakian gunung atau penjelajahan hutan, yang saat pulang beban semakin berkurang. Logistik berkurang dan pulang dengan ringan. “Tapi, kalau kita



keluar hutan harus membawa sampel gambut. Berair pula. Tidak mungkin kita peras gambutnya biar ringan, kan....”

Suatu kali, begitu banyak sampel yang terkumpul, tim tak mampu membawanya keluar dari Tripa. “Akhirnya kita tinggalkan sebagian sampel, kira-kira 10 kilogram. Setelah pulang, dua hari kemudian kita ambil lagi. Untungnya bisa kembali masuk melalui pos keamanan perusahaan, karena kita tidak membawa alat bor.” Saat tiba di lokasi, sampel gambut ternyata telah hangus terbakar. “Terpaksa mengebor lagi,” sergah Indrianto.

Ada-ada saja tantangan di lapangan.

Secara alami, di sekitar Tripa terdapat badan-badan air yang menampung luruhan daun, ranting dan cabang. Tumpukan organik yang terendam air itu tidak terdekomposisi, yang selama jutaan tahun menjadi tanah gambut. Sebagian genangan air dibentuk oleh sungai yang telah mati, karena jalurnya berpindah.



ADAKAH ASA DI TRIPA?

Sejarah panjang konversi lahan membuat banyak pihak ragu apakah Tripa masih punya nilai konservasi di masa depan. Pada 2005, setelah konflik Aceh dan tsunami, menunjukkan: bila dibiarkan, kanal air akan menutup secara alami, dan vegetasi tumbuh cepat. Untuk menjawab keraguan itu, Yayasan Ekosistem Leuser melakukan kajian gambut selama Juni 2013 - Maret 2014. Tim ini bekerja di 'wilayah fokus', dengan 1 km sabuk penyangga di sekeliling tepi hutan. Selama di lapangan, tim mencuplik sampel di 82 titik di 'wilayah fokus'.

Berlimpah Bahan Organik

Sifat kimia dan fisik dari sampel tanah mengandung bahan organik tinggi, yaitu di atas 65% kandungan bahan organik pada kedalaman 50 cm teratas. Artinya: meski mengalami gangguan dalam jangka panjang, kandungan bahan organik pada sebagian besar lahan rawa gambut Tripa masih terjaga.

Gambut Dalam

Kedalaman gambut Tripa maksimum: 8,5 meter, dengan rata-rata kedalaman 3,46 meter. Hasil kajian: setidaknya 53 ribu hektar atau 71 persen wilayah fokus kedalaman gambutnya di atas 50 cm, dan 20 ribu hektar berkedalaman di atas 3 meter 28 persen wilayah fokus. Kedalaman 50 cm selalu dipandang sebagai syarat untuk klasifikasi tanah organik sebagai 'gambut'. Selain itu, tak terdapat banyak dasar ilmiah untuk melindungi gambut hanya di kedalaman lebih dari 3 meter. Angka dalam Perpres Nomor 32/1990 menetapkan gambut dengan kedalaman di atas 3 meter harus dikelola sebagai daerah lindung. Hasil kajian ini, mengikuti pendapat ilmiah, mengakui semua wilayah gambut dengan kedalaman di atas 50 cm sebagai kawasan dengan 'nilai konservasi tinggi.'

Cadangan Karbon

Stok karbon periode 2011-2020 dapat menekan emisi gas rumah kaca sebesar 28.651.645 juta ton karbon (estimasi minimum) dan 34.682.645 juta ton carbon (estimasi maksimum). Nilai ini berkisar 4,3-5,2 persen dari komitmen pemerintah Indonesia 26 persen pengurangan emisi secara unilateral.

Masih Bernilai Konservasi

Hasil kajian menunjukkan kerusakan lahan hutan tak selalu berarti kerusakan lahan gambut. Tripa terbukti masih menyimpan cadangan karbon yang relatif besar. Dengan demikian penggundulan hutan saat ini dan di masa datang akan menyebabkan emisi karbon yang signifikan. Masih ada harapan bagi rawa gambut Tripa, tetapi dengan syarat: hutan rawa gambut yang tersisa dilindungi, pengeringan rawa dihentikan, dan perkebunan yang melanggar hukum dikeluarkan dari wilayah ini.



Apalagi saat mengambil cuplikan gambut di wilayah yang berhutan. Ekosistem Tripa yang belum tersentuh manusia begitu lebat dan rapat. Tak mengherankan, kata Indrianto, pada masa penjajahan Belanda, hutan rawa Tripa menjadi tempat persembunyian para pejuang Aceh. “Sejak zaman Belanda, Tripa dikenal tempat pelarian pejuang Aceh. Belanda mengakui rapatnya hutan Tripa.”

Penelitian gambut membawa Indrianto menyaksikan sendiri kelebatan Rawa Tripa. “Vegetasi pandan berduri sangat rapat. Untuk menembus kita bisa seharian. Sampai kelelahan kami. Dalam sehari hanya bisa berjalan 1 kilometer.”

Selain menembus onak, tanah gambut yang lembek membuat tim mudah terperosok. “Kita pijak, jeblos, karena membawa bekal dan sampel gambut.”

Menghadapi hutan nan rapat, dan gambut yang lembek, tim pun berbagi tugas. Satu orang menjadi perintis jalan, menembus pandan berduri. Perintis tidak membawa beban, agar berkonsentrasi membuat rintisan. “Kalau membawa bekal, dia sulit membuat jalan rintisan, banyak duri, dan bisa terkena parang. Dia konsentrasi membuat rintisan.”

Dua orang lainnya bertugas mengebor dan mencuplik gambut; satu orang



Berbagai flora juga dijumpai tim lapangan yang melakukan survei gambut. Semakin masuk ke dalam hutan gambut Tripa, semakin nyata kekayaan hayati di dalamnya. Nama besar Tripa di masa lalu membuat warga enggan memasuki hutan gambut. Pembukaan secara besar-besaran untuk kebun sawit telah meruntuhkan reputasi itu (kanan-kiri).

mencatat dan memotret sampel; seorang lagi menjadi pemasak. “Kita perlu tukang masak. Sudah capek-capek mengambil sampel seharian masih memasak di tenda...”

Lantaran pekerjaan mengambil sampel gambut membuat tangan kotor, diperlukan pencatat khusus di lembar data tentang warna gambut, kedalaman, dan kedalaman pemboran. “Tanah gambut ternyata berlapis-lapis, tidak seluruhnya gambut. Bisa tanah, lalu gambut, tanah lagi, gambut lagi.” Pencatat ini lumayan enak kerjanya, kata Indrianto, “tapi saat pulang, dia membawa jatah sampel lebih banyak.”

Rimba Tripa yang perawan memiliki hamparan gambut yang tebal. Permukaan tanahnya diselimuti lumut bagaikan permadani. “Tebal lapisan lumut selutut, yang berada di atas tanah gambut yang basah. Kalau kita iris lapisan lumutnya, akan keluar air. Tak lama kemudian, muncul ikan-ikan kecil yang tidak ada di tempat lain. Dari celah-celah gambut itu, ikan-ikan bermunculan.”

Hutan pandan bagaikan neraka bagi tim lapangan. Setelah melewati kelebatan pandan, kata Indrianto, “Kita senang, jalan lebih mudah dan bebas. Kita jalannya cepat.”



Mudah menancapkan, tapi setengah mati untuk mencabut mata bor. Tanah gambut yang lembap mencengkeram bilah bor, sehingga perlu tenaga ekstra untuk mencabutnya (atas). Bilah bor mencuplik tanah gambut di kedalaman 1,5 meter: tanah gambut diselingi lapisan tanah mineral dan abu (berwarna keabu-abuan). Serpihan batang kayu yang masih utuh juga ikut terbawa (berwarna kuning). Artinya, adanya abu menunjukkan di titik ini pernah terjadi kebakaran di masa lampau. Sementara itu, lapisan tanah mineral di sela gambut menunjukkan peristiwa banjir di masa lalu.





MENEMBUS PANDAN

Salah satu anggota tim survei merintis jalan di antara pandan berduri tajam di tengah hutan Tripa. Perintis jalur hanya bertugas menembus pandan, lalu disusul oleh anggota yang lain. Rapatnya vegetasi pandan memperlambat pekerjaan tim survei di lapangan.





Mata bor ini meraup sampel gambut di lahan kebun masyarakat. Meski telah mengalami gangguan dalam jangka panjang, kandungan bahan organik pada sebagian besar lahan Tripa masih terjaga.

Di sela-sela hamparan gambut terdapat gundukan tanah liat yang disebut sematang. Di tanah mineral ini, tumbuh palem, pinang merah, dan habitat satwa liar. “Kalau di tanah gambut, semua ditumbuhi pandan karena miskin hara. Jadi kalau titik sampel harus melewati pandan, rasanya sangat menyedihkan.”

Semakin dalam menyusup ke hutan Tripa, semakin terang kekayaan hayati ekosistem rawa gambut di pesisir barat Aceh ini. “Semakin kita telusuri Tripa, semakin banyak potensi keanekaragaman hayatinya,” Indrianto menegaskan. Segala macam flora-fauna dijumpai tim yang menjadi ujung tombak penelitian gambut ini. “Kita bisa jumpa beruang, aneka ular, binatang melata. Kita bisa menjumpai induk orangutan dengan anaknya. Kita banyak menemukan sarang orangutan. Selama ini kita monoton memperhatikan pada orangutan.”

SELURUH sampel gambut hasil jerih payah tim lapangan Yayasan Ekosistem Lestari itu lantas dianalisis di laboratorium. Hasilnya membuat terkesiap: Rawa Tripa merupakan tandon karbon yang berlimpah ruah.

Kawasan ini terdiri dari tiga kubah gambut dengan kedalaman maksimum 8,5 meter. Rata-rata kedalaman gambutnya sekitar 3,5 meter. Artinya, gambut Rawa Tripa pantas dilindungi dan dijaga. Para peneliti YEL menetapkan wilayah gambut

Tripa dengan kedalaman lebih dari 50 cm merupakan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Dengan begitu, Tripa sebenarnya wajib dilindungi.

Status itu mensyaratkan adanya upaya rehabilitasi dan menjaga keutuhan fungsi ekologis wilayah ini. Sebagai ekosistem yang rumit, sejak 1990-an, Tripa telah menanggung beban antropogenik. Hal ini tersingkap dari kajian YEL: baik sifat kimia dan fisik dari sampel gambut menunjukkan variasi kedalaman gambut, tipe penggunaan lahan, dan waktu terjadinya gangguan di Tripa. Hal itu menunjukkan sejarah panjang yang rumit dari perubahan lahan, seperti banjir, pengeringan gambut, penggundulan hutan, dan pengembangan pertanian.

Perombakan lahan gambut saat ini dan masa lampau di seluruh Tripa telah berdampak terhadap lahan gambut yang masih tersisa, atau bahkan lahan yang masih berhutan. Ringkasnya, kajian YEL mengingatkan pihak-pihak terkait untuk menghentikan kegiatan yang berdampak negatif di sekitar kawasan gambut dengan nilai konservasi tinggi.

Salah satu pelajaran yang menarik dari kajian gambut rawa ini adalah hasil rinci tentang gambut Tripa. Landscape Protection Specialist YEL Graham Usher menuturkan bahwa banyak pihak telah menerbitkan peta sebaran gambut di Indonesia. Dari berbagai peta itu, Graham memetik sebuah pelajaran:

realitas geografis sering dikalahkan oleh kepentingan politik.

“Kalau survei menemukan ada gambut dalam, ya, harus dinyatakan memang ada gambut dalam, terlepas dari apakah itu lahan konsesi, areal penggunaan lain atau apapun.” Graham sedang menegaskan bahwa kajian ilmiah itulah yang digunakan untuk perencanaan tata ruang—dan tidak tergantung pada kepentingan politik. Dari kajian ilmiah itulah yang menjadi dasar perencanaan tata ruang, sehingga alokasi fungsi kawasan bisa ditentukan, entah untuk perlindungan, budidaya maupun permukiman.

Hasil mutakhir dari survei gambut Tripa membuka wawasan baru. Pelajarannya: peta gambut sebelumnya di kawasan ini ternyata menaksir terlalu dangkal (underestimate) kedalaman gambut. Peta Wetlands International Indonesia misalnya menyatakan kedalaman gambut Tripa antara 2-4 meter. “Kita menemukan ternyata ada gambut Tripa sedalam 8 meter. Bahkan adanya yang lebih dari 8 meter,” imbuhnya.

Bila taksiran terlalu dangkal itu terjadi di semua kawasan gambut di pesisir barat Sumatera, katanya, “Berarti underestimate-nya sangat parah.” Lantaran berbatasan dengan Samudra Hindia dan rawan amblas, masa depan kawasan bergambut di pesisir barat Sumatera tak akan pernah diketahui. “Kita tidak akan pernah tahu masa depan





SAWIT MIRING

Tanah gambut tak mampu menopang pohon sawit yang berat. Pohon-pohon sawit yang miring menandakan ia tumbuh di tanah gambut.

Setelah mencuplik, tanah gambut lantas diuji sifat-sifat kimia dan fisiknya. Secara umum, sifat kimia dan fisik sampel tanah Tripa mengandung bahan organik tinggi: di atas 65% kandungan bahan organik.

peisir barat Sumatera. Masalahnya, sudah berapa ribu hektar lahan gambut yang telah didrainase dan dibakar, sementara kita belum tahu kedalamannya. Padahal itu gambut peisir dan kita tidak tahu kondisinya dalam 20 tahun ke depan.”

Graham memaparkan konteks geografis sebaran rawa gambut di sepanjang pantai barat. Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah kawasan gambut di peisir barat mulai dari Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Barat.

Dari berbagai lokasi itu, yang relatif masih tersisa adalah rawa gambut Singkil, Kluet dan Tripa. Rawa Singkil menjadi suaka margasatwa dan Kluet berada di Taman Nasional Gunung Leuser. Sementara Tripa menjadi areal penggunaan lain yang telah dikuasai berbagai perusahaan sawit. “Jadi kembali lagi bahwa realitas geografi selalu kalah dengan kepentingan politik,” Graham mengingatkan.

Hasil kajian YEL juga menegaskan rentannya masa depan Tripa. Ini sebuah tengara mengerikan yang menentukan masa depan peisir barat Aceh dengan pengalaman sedih terjangan tsunami 2004. Peisir Tripa dibatasi Samudra Hindia di sisi barat-selatan. Secara alami, rawa gambut dibentengi kawasan peisir yang menahan gempuran ombak dan intrusi air laut.

Keberadaan tiga kubah gambut yang tak jauh dari peisir menegaskan Rawa



Tripa mutlak dilindungi. Kubah gambut yang tak terganggu mampu menjaga tingkat muka air tanah tetap tinggi. Bila dikeringkan dengan kanal-kanal, kubah gambut akan ambles dan teroksidasi. Seiring waktu, oksidasi dan amblesnya gambut akan membentuk cekungan. Sementara itu, permukaan air laut dunia diprediksi akan naik antara 0,3-2,3 m pada 2100 yang akan menggerus garis pantai Tripa.

Turunnya lahan gambut di Tripa bukan omong kosong. Penyelia Program Tripa Riswan Zen menunjukkan sebuah foto tonggak pohon yang telah terbakar. Tanah gambut yang menyangga pohon itu telah



menjadi abu, dan turun, sehingga tonggak akarnya mengambang.

“Tanah di Tripa sudah di bawah titik nol dari permukaan laut,” ungkapnya. Dengan kata lain, hamparan gambut telah berada di bawah permukaan laut. Graham mengimbuhkan, dengan lapisan tanah mineral yang terdalam 8 meter yang ditutupi kubah gambut, kelak Tripa akan menjadi tanah cekungan yang dalam. Dia mengutip hasil kajian di 25 lokasi tanah gambut di pantai timur Sumatera. Di sana, penurunan tanah gambut rata-rata 5 cm per tahun atau 1 meter setiap 20 tahun. “Untuk lahan sawit di Jambi, penurunan lebih cepat 5,4 cm per tahun,”

kutip Graham. Turunnya tanah gambut (subsiden) makin cepat bila pembersihan lahan dilakukan dengan cara membakar.

Akankah Tripa menjadi hamparan laut kelak? Suratman, seorang warga Tripa dari Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, punya prediksi kelam: “Di masa depan, Tripa bisa menjadi lautan. Air laut masuk karena tanah gambutnya turun. Dan saya sudah punya nama, yaitu Lautan Tripa.”

Agar tengara itu tidak menjadi kenyataan, tak ada cara lain selain melestarikan ekosistem Tripa. Dan itu juga berarti menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan konservasi. ***



EKOSISTEM SUAK

Secara lokal, genangan air alami disebut suak di Aceh. Danau-danau ini menyimpan air tawar di dekat muara di pesisir barat Aceh, yang menjaga pasokan air untuk musim kering.





MENGINTIP TRIPA

Padatnya vegetasi Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa dapat dilihat dari pantai Suak Dama. Kawasan lindung membuka harapan bagi ikhtiar konservasi rawa Tripa, dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat setempat.

A photograph of several water buffaloes standing in a shallow body of water, likely a wetland or rice paddy. The background features a dense line of tall grasses and a thick forest of green trees under a clear blue sky. The scene is captured in natural light, suggesting a bright day.

KONSERVASI DAN EKONOMI

PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK MENUMBUHKAN
RELASI TIMBAL-BALIK: MASYARAKAT BERDAYA, LANTAS
MENJAGA TRIPA. HARAPAN UNTUK MELAHIRKAN KADER
LINGKUNGAN DARI KEMANDIRIAN EKONOMI.

Senja turun di pantai Suak Dama. Pohon-pohon cemara laut berderet di sepanjang sempadan pantai. Setelah tsunami 2004 menghantam Suak Dama, di Babah Lueng, Tripa Makmur, Nagan Raya, cemara laut ditanam untuk membentengi kawasan pesisir.

Di sepanjang tepi jalan menuju Suak Dama, beberapa rumah penduduk nampak seragam. Koordinator Lapangan Proyek Tripa Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Indrianto menuturkan rumah-rumah itu dibangun pada masa rekonstruksi Aceh setelah bencana tsunami 2004.

Pada beberapa cekungan tanah, hamparan lahan basah membentuk kolam-kolam alami dengan tumbuhan khas air. Genangan air ini kerap disebut suak. Pada tikungan-tikungan sungai yang berbentuk U, lantaran alirannya telah berpindah, air lantas membentuk danau alami. Barangkali suak-suak inilah yang di masa lalu membentuk kubah-kubah gambut.

Dari Pantai Suak Dama, tepi barat Rawa Tripa terlihat membentang luas. Kawanan kerbau berendam di tengah-

tengah muara. Nun di seberang muara, vegetasi pandan yang rapat memagari tepian muara dan pantai Rawa Tripa.

Selain indah, pantai Suak Dama rupanya memberikan sedikit ruang untuk mengintip sebagian kecil Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa. Dari pantai ini, siapa pun bisa membuat perbandingan antara upaya manusia dengan alam dalam membentengi kawasan pesisir.

Sabuk hijau cemara laut yang ditanam setelah tsunami tidak akan menandingi rapatnya vegetasi gambut Tripa. Sewaktu survei ketebalan gambut, Indrianto pernah merasakan padatnya vegetasi. “Setengah mati menembusnya.”

Jadi, sudah sepantas akal sehat bila Rawa Tripa dilindungi. Dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh 2013-2034, pemerintah Aceh telah menetapkan Kawasan Lindung



Di pantai Suak Dama, dua warga menaikkan lembaran kayu segar dari hutan rawa Tripa. Pengembangan ekonomi alternatif dapat membantu mengurangi ketergantungan warga terhadap hutan. Upaya itu harus dibarengi dengan penjagaan kawasan lindung gambut yang telah ditetapkan pemerintah Aceh. Ini berarti pekerjaan besar baru dimulai setelah kawasan lindung ditetapkan.

Gambut Rawa Tripa seluas 11.359 hektar. Kawasan lindung mencakup bekas areal PT Kalista Alam yang seluas 1.605 hektar.

Peta usulan kawasan lindung gambut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nagan Raya mencakup sempadan pantai sampai ujung barat Tripa—muara Krueng Tripa. Dari tepi muara, kawasan lindung merentang ke arah timur, mencakup garis pantai, kemudian masuk ke utara ke sebagian lahan PT Surya Panen Subur seluas 5.000 hektar dan bekas lahan Kalista Alam. Sisi timur kawasan lindung gambut dibatasi oleh Krueng Seumayam yang juga batas alam antara Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Barat Daya.

Secara sekilas, dengan memadukan peta usulan kawasan lindung gambut dengan peta ketebalan gambut YEL, terlihat kawasan lindung hanya mencakup satu kubah gambut di lahan bekas Kalista Alam. Selebihnya, kawasan lindung mencakup hamparan gambut dengan kedalaman bervariasi antara 25 cm sampai tujuh meter.

Pada senja yang lindap itu, di pantai Suak Dama, dua orang sedang menurunkan lusinan papan kayu segar ke bantaran muara. Setelah mengobrol dengan mereka, Indrianto tahu kayu itu dipungut dari Tripa yang berada di seberang muara.



Dominannya kebun sawit membuat masyarakat bertumpu pada komoditas ini. Perusahaan sawit yang menggarap lahan relatif luas tentu akan dicontoh oleh masyarakat. Tak ada yang salah dengan hal itu. Hanya saja, untuk kawasan rentan seperti Tripa, diperlukan alternatif sumber ekonomi selain sawit yang berbasis lahan.

Indrianto menuturkan bahwa setelah ditetapkan, kawasan lindung gambut nyaris tanpa pengamanan. Pembalakan liar dan perambahan mengintai kawasan lindung. Seperti sore itu, di tepian muara Krueng Tripa, dua oknum dengan bebas menurunkan papan kayu ilegal dari Tripa. Dua hari sebelumnya, Indrianto mendengar gergaji mesin meraung dari kedalaman hutan di lahan PT Surya Panen Subur seluas 5.000 hektar yang dimasukkan dalam kawasan lindung.

Tripa adalah ekosistem rawa gambut yang penuh luka. Hampir ambruknya ekosistem ini telah disaksikan dan dirasakan masyarakat sekitar: banjir

meluas, mencari ikan dan lokan kian sulit. Rawa Tripa menyerap dan menahan air saat puncak musim hujan; sebaliknya saat hujan, Tripa menjaga aliran air secara ajek ke sungai.

Masyarakat setempat mengamati dan merasakan konversi hutan gambut telah mengganggu fungsi itu. Secara sosial, eksploitasi Tripa juga menyebabkan panasnya isu-isu lokal: konflik lahan, hilangnya mata pencaharian penduduk, meningkatnya frekuensi banjir yang meluas.

Gejolak yang pernah melanda kawasan ini menyiratkan perlunya memadukan



upaya konservasi dengan pemberdayaan ekonomi. Aceh Liaison Officer YEL Teuku Muhammad Zulfikar menuturkan program ekonomi di sekitar kawasan yang sensitif, seperti di Rawa Tripa, tentu menuntut kehati-hatian. Salah satu bentuk kehati-hatian itu: agar ekosistem Tripa terjaga, pemberdayaan ekonomi dilakukan di lanskap produksi milik masyarakat.

Dengan penalaran seperti itu, upaya mengembangkan sumber pendapatan alternatif nantinya akan membentuk relasi timbal-balik: ekonomi berdaya, lalu masyarakat berkomitmen menjaga Tripa. Ringkasnya, dari program ekonomi

akan lahir kelompok-kelompok kader lingkungan.

PROSES PANJANG menjaga ekosistem Rawa Tripa telah dirintis oleh Yayasan Ekosistem Lestari. Pada awal 2005 memasuki masa damai dan setelah tsunami, YEL menemukan sebagian besar konsesi ditinggalkan oleh perusahaan sejak 1999. Secara alami, kanal-kanal terblokir, dan air gambut menumbuhkan kembali hutan yang telah dibuka. Pohon rawa tumbuh kembali mengalahkan tanaman perkebunan.

Sayangnya, setelah tsunami 2004 dan diikuti Kesepakatan Damai Helsinki pada 2005, perombakan hutan, baik yang legal maupun ilegal, kembali mewabah. Masa rekonstruksi Aceh pascatsunami dan pulihnya tumbuhan rawa sebenarnya memberikan momen untuk menyelamatkan Tripa. Perlindungan ekosistem ini sebagai benteng pesisir dari terjangkit tsunami nampaknya tak banyak dipahami oleh pihak-pihak terkait.

“Waktu itu ada kesempatan, hutan memulihkan diri karena perusahaan tidak aktif, dan setelah tsunami juga ada proses rekonstruksi untuk menata kembali wilayah Tripa. Sayangnya, tawaran program itu tidak berterima. Sebenarnya, kalau waktu itu bisa, hari ini jauh lebih banyak yang bisa diselamatkan,” papar Graham Usher, Landscape Protection Specialist YEL.



Setelah itu, sekitar tahun 2010, YEL melalui kemitraan dengan RARE, memfasilitasi masyarakat di 21 desa di sekitar Tripa menandatangani Petisi Penyelamatan Rawa Gambut Tripa. Dengan mengacu program pemerintah Aceh yang menghidupkan kembali lembaga adat, dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, YEL dalam pendampingan dan penyadartahuan masyarakat melibatkan dua kemukiman: Tripa Bawah dan Seneuam. Dua kemukiman ini mencakup 21 desa untuk dilibatkan dalam pengelolaan kawasan Rawa Tripa yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tanpa pemberdayaan ekonomi, wilayah yang rentan akan menanggung beban dijadikan sebagai sumber penghidupan warga sekitar. Sebenarnya dengan cara-cara tradisional

dan ramah lingkungan, pemanfaatan tak akan mengganggu ekosistem rawa gambut ini. Namun, dominasi perkebunan sawit telah mengurangi kesempatan masyarakat mengunduh hasil hutan bukan kayu.

Sejarah panjang yang muram membuat kesadaran pemanfaatan hutan secara bijaksana kalah bersaing dengan cara praktis dan singkat: buka lahan, bakar, lalu tanam. Alhasil, cara yang ada di depan mata itu lantas dicontoh, dilakukan, dan tak perlu repot berpikir tentang pelestarian. Keadaan ini membuat tantangan makin pelik, dan mau tak mau, upaya konservasi mesti diimbangi dengan pengembangan ekonomi.

Tak ada jalan lain: upaya pelestarian Tripa harus dilakukan dengan berbagai cara. Selain kampanye, advokasi, dan penggalangan dukungan masyarakat lokal, program lain yang tidak bisa

Dengan mengajak masyarakat dalam pembibitan, diharapkan lahir kader-kader lingkungan yang memiliki kesadaran menjaga Tripa. Dalam program ini juga menekankan transfer pengetahuan untuk membuat bibit, seperti teknik okulasi, cangkok dan stek .

dilupakan adalah penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Penguatan ekonomi ini penting mengingat masyarakat adalah tiang penyangga bagi pelestarian Tripa. Persoalan tentu saja agak rumit: sebagian besar masyarakat di Tripa berpenghasilan rendah di bawah Rp 1 juta di bawah upah minimum pekerja Provinsi Aceh yang Rp 1,55 juta per bulan.

Rendahnya penghasilan ini akan mendorong masyarakat menggantungkan hidup kepada perkebunan sawit. Perusahaan yang menggarap lahan relatif luas sudah pasti butuh pekerja harian yang sebagian besar direkrut dari masyarakat lokal. Gaji pekerja harian beragam mulai Rp 40.000 hingga Rp 60.000 per hari.

Bila jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada perkebunan makin banyak, perusahaan akan mendapat keuntungan ganda. Pertama: mudah mendapatkan tenaga kerja bergaji murah; dan kedua, kehadiran pekerja lokal tak jarang dijadikan tameng untuk menghindari kritik dari pegiat lingkungan.

Kondisi ini terlihat jelas dengan terjadinya perpecahan di antara sesama masyarakat lokal. Mereka yang bekerja di perkebunan cenderung mendukung pengembangan sawit, sedangkan sebagian masyarakat yang memahami pentingnya Tripa, bersama para pegiat lingkungan,

menolak ekspansi sawit.

Ironisnya, sejumlah tokoh masyarakat di Nagan Raya telah direkrut sebagai pekerja di perusahaan. Beberapa di antaranya mendapat jabatan cukup strategis seperti mandor atau staf yang bergaji di atas Rp 2,5 juta per bulan. Mereka yang kemudian berada di garis depan menghadang protes terhadap kehadiran perkebunan.

Tak bisa dibantah lagi. Konflik pecah di antara warga Tripa. Sebagian mendukung perkebunan, sebagian menolak. Yang menarik, perusahaan juga melibatkan anak-anak muda. Mereka tidak bekerja sebagai tenaga perkebunan, melainkan untuk berkampanye menentang upaya penyelamatan Tripa.

Melihat fenomena tersebut, ikhtiar pemberdayaan ekonomi menjadi penting untuk mencegah masyarakat terlalu bergantung pada perkebunan sawit. Pemberdayaan ekonomi di kawasan-kawasan konflik, seperti di Rawa Tripa, adalah lazim dilakukan sebagai respon sosial atas kesenjangan ekonomi. Pemberdayaan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mencurahkan kemampuannya dan menggerakkan roda ekonomi bersama-sama. Pemberdayaan tersebut disepadankan dengan partisipasi.

Agar partisipasi berjalan efektif, program pemberdayaan dilakukan secara demokratis. Artinya: pemberdayaan

Prakarsa ekonomi alternatif untuk melepas ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem Tripa utamanya yang bisa merusak hutan, seperti merambah dan mencari kayu.

mendorong lahirnya gagasan dari masyarakat untuk mengusulkan aktivitas ekonomi yang cocok dikembangkan di wilayah mereka. Untuk menggalang ide tersebut, kegiatan pemberdayaan diawali dengan survei untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai pengelola program, YEL sepakat akan memberikan bantuan dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk pelatihan sistem pengelolaan usaha ekonomi.

Untuk itu, dengan dukungan TFCA Sumatera, semenjak tahun 2012 YEL memprakarsai pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat setempat. Koordinator Program Tripa YEL Diana Kusmanto menuturkan bahwa pemberdayaan untuk menumbuhkan kemandirian dengan usaha sesuai keinginan warga yang terlibat. “Pada tahun pertama ada modal usaha, lalu dilakukan pendampingan. Jenisnya sesuai keinginan warga dari hasil kajian sosial ekonomi.”

Program ini melibatkan 120 penerima manfaat dari 12 gampong di tiga kemukiman: Seuneum Timur, Seuneum Barat, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya; dan Bahbarot, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya. Masing-masing kemukiman terdiri dari empat gampong. Pada awal program, YEL bersama masyarakat mengembangkan pembibitan untuk merehabilitasi

lingkungan sekitar yang terdegradasi.

Pembibitan ini menumbuhkan berbagai tanaman lokal, baik kayu keras maupun buah-buahan yang biasa hidup di rawa gambut. Dalam program ini YEL juga menekankan transfer pengetahuan dan pembelajaran untuk membuat bibit, seperti teknik okulasi, cangkok dan stek.

Untuk kayu keras, masyarakat mengembangkan bibit jabon, sengon dan mahoni untuk merehabilitasi lahan kritis. Ada juga pembibitan bernilai ekonomi, seperti rambutan dan durian. Setelah siap tanam, bibit disebar kepada komunitas dampingan.





Setiap kemukiman kumpulan beberapa desa mendapatkan jatah 3.000 bibit jabon, sengon, mahoni, rambutan dan durian. Pohon kayu keras ditanam di lahan kritis, sedangkan pohon buah ditanam di kebun masyarakat.

Pohon merupakan investasi jangka panjang. Artinya, dalam waktu singkat pohon belum memberikan keuntungan. Untuk durian dan rambutan misalnya, baru menghasilkan buah setelah berumur 7 – 8 tahun; sedangkan pohon jabon memasuki masa panen setelah 7 tahun. Bahkan mahoni lebih lama lagi, lantaran butuh waktu puluhan tahun.

Di masa datang, pohon keras untuk memenuhi kebutuhan kayu perkakas, sehingga warga tidak perlu menebang pohon di hutan seperti yang dilakukan dua orang di Suak Dama itu. Di sisi lain, warga bisa memanfaatkan pohon buah untuk konsumsi domestik maupun dijual.

Dengan demikian, alih-alih sebagai usaha alternatif, program pembibitan sebenarnya untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Selain sebagai wujud komitmen bersama untuk melestarikan Tripa, warga juga membutuhkan pohon-pohon sebagai pembatas lahan. Mereka menanam



Awalnya, warga beternak ikan lele sangkuriang, yang ternyata kalah pamor dengan lele lokal. Untungnya para peternak cukup responsif: mereka berganti usaha dengan memelihara ikan patin. Ikan ini lebih diminati konsumen sehingga memudahkan pemasarannya.

mahoni di sempadan parit karena pohon ini bisa memperkokoh tanah.

Mereka juga menaruh minat tinggi pada pohon jabon karena pertumbuhannya sangat cepat. Durian dan rambutan juga tumbuh subur, hanya saja masyarakat mesti bersabar menanti tumbuhan ini berbuah kelak.

Pertumbuhan pesat terlihat pada pohon jabon dan sengon. Memasuki usia 15 bulan, diameter batang pohon ini berkisar 25-30 cm, tingginya mencapai 10 meter. Pertumbuhan sengon hampir sama cepat dengan jabon, hanya saja pohon sengon tumbuh dengan banyak cabang,

sedangkan batang jabon tumbuh lurus. Untuk mahoni, sampai usia 16 bulan, diameternya baru sekitar 3 cm dengan tinggi 2 meter. Meski lambat, mahoni bermanfaat memperkuat struktur tanah di pinggir parit.

Untuk melengkapi upaya pelestarian lingkungan, YEL mengembangkan beberapa jenis usaha ekonomi sesuai aspirasi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari program besar memulihkan dan melindungi Rawa Tripa. Pada hakikatnya, prakarsa ekonomi alternatif untuk melepas ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem Tripa utamanya yang bisa merusak hutan,



seperti merambah, mencari kayu.

Dengan demikian, selain melestarikan kekayaan hayati dan jasa lingkungan, ekonomi alternatif akan menggeser sumber pendapatan ke lahan-lahan produktif milik masyarakat. Intinya, kemandirian ekonomi muncul dari aset lahan masyarakat.

ADA DUA CARA pengelolaan usaha: secara individual dan komunal. Jenis usaha yang dikembangkan berbeda-beda di tiap kemukiman tergantung pada usulan anggota forum dan hasil studi kelayakan YEL.

Mari mengunjungi Kemukiman Seuneam Timur, Nagan Raya, yang

warganya mengembangkan peternakan itik petelur dan lele. Itik petelur dikelola secara individual, sedangkan ikan lele dikelola secara komunal. Untuk peternakan itik, setiap penerima manfaat mendapatkan 33 ekor plus pakan sampai itik siap bertelur; sedangkan kandang disediakan secara swadaya oleh peternak.

Seekor itik betina minimal bisa menghasilkan telur 1 butir per hari setelah usia enam bulan. Harga sebutir telur di pasar sekurangnya Rp 1.000. Penjualan telur itik lumayan mudah lantaran masyarakat membutuhkannya.

Selain ternak itik, kepada komunitas di Kemukiman Seunaam Timur, YEL juga memberi bantuan modal usaha untuk ternak ikan lele di setiap desa. Untuk langkah awal, YEL menyediakan bibit lele sangkuriang. Rupanya, jenis lele ini tidak populer karena masyarakat lebih mengenal lele lokal atau limbek. Kendati harganya lebih menggiurkan, limbek sulit ditangkap dan dikembangbiakkan.

Sementara itu, komunitas di Kemukiman Babahrot memilih jenis usaha peternakan ayam pedaging. Sebenarnya, seperti halnya warga Seunaam Timur, warga Babahrot juga berhak mendapatkan itik 33 ekor per orang, tapi mereka mengurangnya hanya 20 ekor. Sisa anggaran lantas mereka gunakan untuk pembibitan ayam pedaging yang dikelola oleh komunitas.

Mereka bergotong-royong membangun



Deretan cemara laut ditanam di pantai Suak Dama sebagai sabuk hijau menghadapi bencana tsunami. Kawasan yang pernah dihantam tsunami pada 2004 ini rupanya ingin meniru benteng alami rawa gambut Tripa yang membentang di sebelah timur.

kandang berdaya tampung 200 ekor meski hanya diisi 100 ekor. Peternakan ayam pedaging ini didorong oleh adanya peluang pasar yang cukup besar di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ketua komunitas Kemukiman Babahrot Nasi Ali menuturkan bahwa pasar ayam pedaging di Aceh Barat Daya dikuasai oleh pengusaha dari Medan, Sumatera Utara. “Setiap hari, mereka memasarkan ribuan ayam di wilayah ini. Tapi kami siap bersaing, karena kami yakin mampu membangun komunikasi yang lebih baik dengan sesama warga Aceh Barat Daya.”

Hanya saja, kata Nasi Ali, komunitas belum bisa memproduksi ayam pedaging secara konsisten dan berkelanjutan. “Kami hanya menjual ayam sekali dalam 35 hari, sementara yang pengusaha dari Medan datang setiap hari.”

Usaha lain juga dikembangkan

komunitas di kemukiman Seunaam Barat adalah ternak kambing. Komunitas ini enggan mengembangkan itik petelur sebab pernah gagal sebelumnya. Karena itu, komunitas menginginkan dana bantuan ekonomi untuk modal membeli kambing.

Usaha peternakan kambing dikelola tiga komunitas di tiap desa. Warga Desa Makarti Jaya mendapatkan jatah enam ekor kambing, warga Desa Sumber Makmur dan Sumber Bhakti masing-masing 3 dan 4 ekor. Kandang untuk kambing dibangun secara swakarya oleh masyarakat di tiap desa.

RUPANYA pengembangan usaha alternatif tersebut tak selalu berjalan mulus. Program ini didukung dengan dana terbatas, tapi jumlah anggota masyarakat yang butuh dukungan jauh lebih banyak. Inilah tantangan terbesar dalam pemberdayaan ekonomi di seputar Rawa Tripa.

Selain itu, ada-ada saja hambatan yang dihadapi oleh warga yang menerima manfaat. Salah satunya Musirah Sukarni, seorang ibu di Desa Blang Luah di Kemukiman Seunaam Timur. Dia menuturkan bahwa itik petelurnya sudah berusia sekitar empat sampai lima bulan. Bila saja berjalan sesuai rencana, bulan keenam itik-itik itu akan bertelur. Musirah sedikitnya bisa memanen 20 butir telur sehari. Katakanlah dapat 500 butir per bulan, Musirah sudah bisa mendapat Rp 400 ribu per bulan. Sayangnya, pada suatu pagi, semua itik yang siap bertelur itu mati.

Begitu juga peternakan lele sangkuriang. Ternyata, kualitas ikan lele sangkuriang tak mampu mengalahkan pamor lele lokal limbek. Harganya juga kurang ekonomis, sehingga laba usaha tak seimbang dengan tenaga untuk memelihara lele sangkuriang. Selama enam bulan berjalan, bagi hasil keuntungan yang bisa diperoleh anggota komunitas maksimal hanya Rp 25.000 hingga Rp 75.000 per bulan. Penjualan lele sangkuriang hanya bisa dipasarkan di Meulaboh, karena warga Aceh Barat Daya dan Nagan Raya tidak suka dengan ikan ini. Rentang jarak antara kemukiman ke Meulaboh yang jauh membuat nilai keuntungan menyusut.

Untungnya, peternak lele cukup responsif. Setelah berkonsultasi dengan petugas Dinas Perikanan Nagan Raya, peternak lele

di Desa Blang Luah memutuskan berganti usaha dengan memelihara ikan patin. Pada awalnya, mereka membeli bibit ikan patin 500 ekor dengan masa pemeliharaan 7- 8 bulan. Pada panen pertama, warga memanen 100 kg ikan patin.

Ikan ini rupanya diminati konsumen sehingga tidak terlalu sulit untuk memasarkannya. Bahkan pembeli siap mengambil hasil panen dari kolam dengan harga Rp 40.000 per kilogram. Dari panen pertama itu, komunitas mendapatkan penghasilan sekitar Rp 4 juta.

Yang menggembirakan adalah peternakan kambing. Dalam waktu satu setengah tahun, kambing yang dipelihara warga Desa Makarti Jaya telah berkembang dari enam ekor menjadi 21 ekor. Sementara di Desa Sumber Makmur, semula hanya bermodal tiga kambing, berkembang menjadi 10 ekor. Sayangnya, dua ekor hilang dicuri dan seekor mati. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sumber Makmur: 4 ekor kambing bertambah menjadi 8 ekor.

Usaha ternak kambing yang dikembangkan komunitas di Kemukiman Seunaam Barat ini cukup berhasil. Keberhasilan ini mendorong komunitas memperluas kandang kambing. Kandang yang lama sudah tidak memadai untuk menampung banyaknya kambing.

Jika harga kambing dewasa berkisar Rp 12 juta per ekor berarti peternakan Makarti Jaya meraup Rp 30 juta selama 1,5



MEMULIHKAN DIRI

Di lahan bekas Kalista Alam, hutan gambut kembali tumbuh pelan-pelan. Upaya menjaga kawasan ini dilengkapi dengan pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitarnya. Aksi konservasi lebih efektif bila disertai dengan pemberdayaan masyarakat.





tahun. Hasil ini belum dibagi rata, karena anggota bersepakat ingin meningkatkan peternakan kambing. Mereka berharap kambing mencapai lebih dari 100 ekor, lantas dijual.

Pesatnya perkembangan ternak kambing membuat beberapa anggota menanyakan haknya. Ketua komunitas Seunaam Barat Majid menegaskan bahwa setiap anggota komunitas tetap memiliki hak atas ternak kambingnya. “Saya selalu meyakinkan anggota bahwa hak mereka tidak akan hilang. Saya hanya meminta bersabar, karena kita ingin peternakan berkembang dulu.” Dia menambahkan, setelah jumlah kambing memadai, “Baru kita melakukan usaha ekonomis, semisal menjualnya, dan membagikan hasilnya kepada anggota.”

KENDATI perkembangan setiap jenis usaha berbeda-beda, upaya diversifikasi sumber pendapatan memberikan

pelajaran bagi komunitas penerima manfaat. Tersendatnya usaha hanya bersifat sementara karena komunitas mampu merespon cepat dalam menjalankan usahanya.

“Memang tidak semua kelompok berhasil mengembangkan usahanya,” jelas Diana Kusmanto. Selain dinamika masyarakat yang tinggi, tidak semua penerima manfaat memahami jenis usaha yang digelutinya. “Namun tetap ada pendampingan dan masyarakat masih tetap terlibat dalam pemantauan kawasan lindung gambut.”

Hingga kini, YEL masih mendampingi warga yang menerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi. Meski tidak memberikan modal, ungkap Diana, “Tapi kita memberi solusi dalam menghadapi tantangan setiap jenis usaha. Ternak kambing misalnya kita memberikan



Pelan-pelan, pemberdayaan masyarakat memutar roda ekonomi lokal. Belum besar, tapi nyata. Pesan pentingnya, warga memahami adanya sumber pendapatan lain yang bisa dikembangkan di lahan miliknya. Masyarakat setempat adalah penopang bagi keberhasilan pelestarian ekosistem Tripa beserta isinya.

pelatihan untuk menangani penyakit, dan untuk ternak ikan ada pelatihan pemijahan. Harapannya, usaha-usaha ini bergulir, dan melahirkan kader-kader lingkungan.”

Kader lingkungan inilah yang akan menjadi benteng bagi pelestarian Rawa Tripa di masa datang. Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi akan mendukung upaya konservasi yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat Tripa.

Pembelajaran terpenting: masyarakat memahami ada penghidupan di lahan produktifnya tanpa menyentuh ekosistem Tripa. Hal itu sekaligus menegaskan

bahwa kemandirian sebenarnya dapat dikembangkan di lahan budidaya warga. Dampak positif program pemberdayaan ini adalah munculnya wawasan baru bagi masyarakat: ada peluang usaha lain yang produktif. Peluang-peluang itulah yang hendak ditunjukkan melalui pengembangan ekonomi alternatif. Tak mudah memang, namun harus tetap berikhtiar.**



LELE LOKAL

Masyarakat sekitar telah sejak lama mengunduh lele lokal atau limbek di Tripa. Pemanfaatan secara tradisional ini tetap menjaga ekosistem Tripa apa adanya. Perlindungan akan menjamin jasa lingkungan tetap lestari, dan masyarakat memperoleh manfaatnya dalam jangka panjang.





ANTUSIASME ANAK TRIPA

Anak-anak bersemangat menyambut pendidikan lingkungan tentang keragaman hayati rawa Tripa. Mereka sudah mengenal orangutan, namun belum tahu primata itu dilindungi oleh negara.

MENJAGA MOMENTUM



SETELAH KAWASAN LINDUNG GAMBUT DITETAPKAN,
KINI SAATNYA UNTUK MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN
KONSERVASI TRIPA. TAK ADA LAGI LANGKAH MUNDUR.

Matahari hanya sejengkal dari tengah hari. Dalam bekapan hawa panas, murid-murid Sekolah Dasar di Cot Seumantok, Babahrot, Aceh Barat Daya, berkumpul di aula sekolah. Mereka menatap ke depan, tangan bersilang di atas meja.

Tatapan mata mereka memancarkan rasa ingin tahu. Hari itu, aktivis Yayasan Ekosistem Lestari sedang menggelar pendidikan lingkungan. Di depan kelas, suara fasilitator Supiniati menggema di udara aula yang hangat. Supiniati melambungkan semangat anak-anak.

Untuk menyemarakkan suasana, Supiniati mengajak siswa-siswi kelas satu sampai enam itu aktif bertanya. Rupanya mereka telah mengenal orangutan sumatera (*Pongo abelii*) yang hidup di Rawa Tripa. Mereka mengenalnya dengan nama maweh.

Namun, belum banyak murid yang mengetahui orangutan adalah satwa yang dilindungi. Salah satu staf YEL Nuzuar lantas menjelaskan orangutan sebaiknya hidup liar di hutan-hutan Tripa. Karena itu, hutan mesti dijaga untuk melindungi habitat sang primata. Anak-anak makin

penasaran.

Sebuah film pendek tentang primata berambut merah itu lantas diputar. Aula senyap. Anak-anak menyimak layar putih di depan yang mengisahkan ancaman dan upaya konservasi orangutan sumatera.

Sepanjang 2016, dengan dukungan Tropical Forest Conservation Action Sumatera, YEL akan menggelar pendidikan lingkungan dari sekolah ke sekolah di sekitar Rawa Tripa. Kampanye ini menyasar murid sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sederajatnya di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

Safari pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian anak tentang pentingnya penyelamatan Tripa. Tak mengherankan, pengetahuan baru hari itu menggugah rasa ingin tahu para murid. Ada-ada saja pertanyaan



Berada di barisan paling belakang, siswi-siswi kelas I ini terpaksa duduk di atas meja. Mereka menyimak materi pendidikan lingkungan yang disampaikan secara menghibur. Pembelajaran sejak dini tentang Tripa, dan nilai pentingnya, akan membekali generasi muda dalam menyikapi dinamika di masa datang.

yang muncul.

Siswi Farzia Wanti misalnya. Dia bertanya: “Mengapa orangutan mati?”

“Perburuan liar menyebabkan kematian orangutan, sehingga mengancam kelestariannya. Karena itu, orangutan sebaiknya hidup di hutan dan tidak dipelihara manusia,” jawab Indrianto, Koordinator Lapangan Proyek Tripa.

Saling sahut tanya-jawab itu menebar pengetahuan tentang kekayaan hayati Tripa. Forum yang dikemas ceria tapi mendidik ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda terhadap kelestarian hutan Tripa.

Masyarakat setempat adalah penyangga pertama kelestarian ekosistem rawa gambut ini. Dengan sejarah yang penuh pertarungan, menumbuhkan kesadaran generasi muda akan membawa kesegaran dalam memandang nilai ekosistem Tripa.

Guru-guru yang mendampingi murid mengharapkan kegiatan ini dapat diselenggarakan kembali. Tujuannya agar pengetahuan lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Harapan itu menyiratkan masa depan Tripa ada di tangan generasi mudanya. Kelestarian Tripa di masa datang adalah hasil kerja pendidikan dan penyadartahuan saat ini.



“Kita memang masuk ke semua lapisan masyarakat. Selain tokoh masyarakat dan pemerintah, kita juga menyentuh sekolah,” ujar Koordinator Program Tripa Diana Kusmanto.

Penyadaran juga melibatkan khatib-khatib masjid di sekitar Tripa dengan berbagi pengetahuan tentang konservasi. Sebagai bahan penyadartahuan, YEL menyebar buklet yang berisi kutipan ayat Alquran yang bernuansa konservasi. “Awalnya dimulai bulan Ramadan, kemudian makin intens,” jelas Diana.

Untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang pelestarian

lingkungan diadakan juga pertemuan para khatib dengan tokoh agama dari Banda Aceh. “Topik-topiknya kita pilih yang sesuai dengan konteks lokal,” imbuh Diana Kusmanto.

KECERIAAN anak-anak itu bagaikan penawar sejarah getir Rawa Tripa di masa lalu. Kelestarian Tripa di masa depan akan bertumpu pada keluasan cakrawala anak-anak muda ini.

Nampaknya perlu merenungkan fakta ini: Baru setelah melewati pergulatan yang panjang, kini ada sebagian tanah Tripa yang dilindungi. Itu perlu waktu seperempat abad! Arus balik terjadi saat



Bersama masyarakat setempat, Yayasan Ekosistem Lestari melakukan monitoring di Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa. Pemantauan sekaligus untuk menunjukkan adanya aktivitas di kawasan yang mencegah perambahan dan pembalakan liar.

Graham Usher, Landscape Protection Specialist YEL. Lelaki yang telah lama berkiprah di bidang konservasi di Indonesia ini menjadi saksi makin menyusutnya kawasan hutan dataran rendah.

Pada 1980-an, dataran rendah Sumatera masih diselimuti hutan tropis. Rimbunnya hutan itu seolah-olah tak bakal habis. Faktanya, kini manusia menguasai sebagian besar dataran rendah yang produktif dan kaya keanekaragaman hayati. Kemudian berbagai satwa liar mengungsi ke dataran yang lebih tinggi; sebagian lagi menggantungkan hidup di kawasan rawa gambut di pesisir barat Sumatera.

“Dulu rawa gambut memang tidak disukai perkebunan karena tidak produktif. Selain itu, biaya pengelolaannya lebih tinggi karena perlu alat berat, sementara produktivitasnya rendah,” lanjutnya. Tapi setelah ada alat berat, perusahaan merambah rawa gambut. Agar murah, perkebunan membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar.

Ringkasan sejarah alam Sumatera itu memberikan gambaran kenapa rawa gambut di Singkil, Kluet dan Tripa memiliki populasi terpadat orangutan sumatera. Setelah Tripa dikuasai perkebunan, orangutan hidup di keping-keping habitat yang tersisa.

“Ada beberapa sisa hutan kecil di sekitar

pengadilan menjatuhkan vonis bersalah bagi PT Kalista Alam, yang memberikan harapan bagi Tripa. (Keputusan itu menyalakan semangat penegakan hukum dalam kasus kebakaran lahan dan hutan tidak hanya di Tripa tapi juga di wilayah lain di Sumatera.) Hukuman itu menegaskan bahwa Tripa, yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser, wajib dikelola oleh pemerintah Aceh sesuai kaidah konservasi.

“Anak-anak sekarang kalau mau melihat hutan di mana? Ini sebenarnya warisan alam nasional yang akan hilang dan tidak bisa dilihat lagi kalau kita tidak berjuang keras melindunginya,” tegas



MONITORING TRIPA

Menggunakan pesawat nir-awak, Yayasan Ekosistem Lestari terus memantau perkembangan tutupan hutan di lahan bekas Kalista Alam. Aktivitas ini untuk memastikan kawasan lindung gambut tetap terjaga dan terlindungi.





bekas lahan Kalista Alam. Waktu survei gambut, tim lapangan masih bertemu orangutan dan beruang,” tutur Graham. Nilai konservasi dari populasi orangutan di Tripa terlihat dari keragaman genetiknya yang masih cukup tinggi. Ini menunjukkan populasi klasik, lanjut Graham, “Dari populasi besar, lalu tiba-tiba menyusut. Jadi, meskipun kecil, tapi keragaman genetiknya besar.”

Keberhasilan para aktivis lingkungan dalam menyelamatkan Tripa memberikan hikmah: betapa pelik dan sulit upaya konservasi. “Sebagai orang konservasi, kita selalu diajak berkompromi. Tetapi realitanya, komprominya selalu satu arah: konservasi selalu dikalahkan oleh kepentingan pembangunan. Sekarang tidak bisa lagi berkompromi, kita harus bikin garis tegas: tak boleh mundur. Kalau tidak tegas, badak, harimau, gajah,

dan orangutan akan musnah. Semuanya sudah kristis.”

Graham menegaskan bahwa dunia konservasi otomatis harus optimis. Selama masih ada harapan dan kesempatan, konservasi harus diperjuangkan. Secara definisi, konservasi adalah keinginan untuk melindungi dan mempertahankan milik bersama.

Seiring waktu masyarakat makin memahami keberadaan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa. Sosialisasi kawasan lindung terus digulirkan. Bersama lembaga swadaya Rawa Tripa Institute (RTI) dan kader lingkungan, YEL melakukan pemantauan lingkungan. “Kita bekerjasama dengan RTI dan kader masyarakat memantau pasang surut air kanal, tingkat penurunan tanah gambut, kelembapan dan suhu. Harapannya kita mendapatkan data yang tak terputus,” jelas



Primata kharismatik ini menjadi bahan diskusi dalam pendidikan lingkungan bagi siswa-siswi SD dan SMP di sekitar Tripa. Kawasan Tripa didiami oleh populasi orangutan terpadat di pesisir barat. Ekosistem gambut ini semakin penting sebagai habitat orangutan karena koridor yang menghubungkan Tripa dengan Kawasan Ekosistem Leuser terputus oleh jalan dan permukiman.

Diana. Enam tim, yang beranggotakan dua orang, memantau di enam titik lokasi seminggu sekali. Diana menuturkan pemantauan juga untuk meningkatkan kapasitas kader masyarakat dan lembaga lokal.

Aktivitas yang partisipatif itu menumbuhkan kesadaran masyarakat. Indrianto mengimbuhkan bahwa masyarakat mulai memahami kawasan lindung gambut. Kini, di sekitar bekas lahan Kalista Alam, vegetasi rawa mulai tumbuh kembali.

“Jalan masuk ke kanal-kanal juga ditumbuhi semak belukar. Tumbuhan

makin rapat,” kata Indrianto. Hutan yang dulu bolong di sepanjang jalur kanal bekas lahan Kalista Alam, kini telah tumbuh kembali. “Orang makin sulit masuk. Tumbuhan semakin rapat sehingga perambah tidak bisa menyentuh kawasan lindung gambut.”

Kendati begitu, Indrianto mengingatkan bahwa lahan PT Surya Panen Subur yang seluas 5.000 hektare, yang termasuk dalam kawasan lindung gambut, nyaris tak ada yang mengurus. Perusahaan menganggap lahan itu sudah diserahkan kepada pemerintah, sementara pemerintah memandang belum ada penyerahan.

Kepada teman-temannya, seorang siswa menunjukkan 'oleh-oleh' dari pendidikan lingkungan di sekolahnya. Kalender ini akan menghiasi rumahnya, dan sekaligus menjadi media kampanye bagi keluarga dan kerabatnya.

“Rupanya komunikasi belum lancar. Kita perlu duduk bersama untuk membahas lahan Surya Panen Subur itu,” imbuh Indrianto. Kepastian status areal Surya Panen Subur ini mendesak. Bila terlalu lama menggantung, dia khawatir sejumlah juragan bermodal akan mengincar lahan itu. Ia rupanya sudah mendengar bisik-bisik para juragan sawit.

Perlahan tapi pasti, lahan bekas Kalista Alam mulai memulihkan diri seiring dengan kepastian hukum yang menegaskan perlindungannya. Selagi sedang berkembang, momentum konservasi itu harus dimanfaatkan untuk melanjutkan ikhtiar perlindungan ekosistem Rawa Tripa.

Pengelolaan kawasan lindung berada dalam kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V Aceh. Lembaga inilah yang akan menjaga, mengawasi dan mengelola kawasan lindung gambut di tingkat lapangan. Dalam sejumlah kesempatan, Indrianto melakukan kunjungan lapangan bersama staf KPHL Unit V ke kawasan lindung gambut.

“Ada sejumlah peristiwa kebakaran hutan pada Agustus 2016 lalu. Hanya titik api kecil yang mungkin dilakukan oleh perambah. Kami bersama polisi hutan mengontrol kawasan. Sejak ada hukuman bagi Kalista Alam dan kawasan lindung gambut, peristiwa kebakaran lahan jauh menurun. Orang juga pikir-pikir kalau mau masuk kawasan lindung.”



Kelak, KPHL dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Tripa secara lestari. Tentu saja pemanfaatan ekosistem ini lebih mengarah kepada jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Sebagai penyimpan dan penyerap karbon, Tripa akan berperan penting dalam mencegah pemanasan global. Dengan demikian, Tripa memiliki manfaat bagi masyarakat global. Di samping itu, perannya sebagai benteng tsunami akan menjaga pesisir barat Aceh. Ke depan, KPHL Unit V bisa mengembangkan imbal jasa lingkungan sebagai bentuk pendanaan bagi pengelolaan gambut Tripa bersama masyarakat.



Indrianto menuturkan di bekas lahan Kalista Alam dapat dimanfaatkan untuk tempat pembelajaran rehabilitasi lahan gambut. “Sekarang kita sedang memetakan areal yang masih utuh, yang dirambah, dan yang sudah ditanami sawit di bekas areal Kalista Alam,” jelasnya. Untuk kebun sawit yang telah ditanam oleh Kalista Alam, Dinas Kehutanan Aceh telah bekerjasama dengan Koperasi Sinpa untuk mengelolannya.

Tapi untuk areal yang pernah dirambah, lanjut Indrianto, perlu direhabilitasi dengan tumbuhan rawa gambut. “Kalau perlu kita mendirikan pos pembelajaran rehabilitasi lahan gambut dan pos

pengamatan orangutan,” Indrianto memaparkan gagasannya.

Di masa datang, seiring dengan habisnya berlakunya izin perkebunan sawit, kawasan Tripa dapat ditata ulang. Momentum kemenangan hukum dan penetapan kawasan lindung gambut, Penyelia Program Tripa Riswan Zen menuturkan, “Pada prinsipnya, kita ingin ada preseden positif di masa depan. Harapannya ada pembelajaran bahwa kita perlu perencanaan yang komprehensif di Tripa: ada zona perlindungan gambut, zona pemanfaatan ataupun zona rehabilitasi.”



Riswan mengakui peliknya memulihkan lahan gambut yang telah lama dibuka dan dirombak menjadi lahan budidaya. “Apalagi tanah gambut juga bersifat irreversible,” imbuhnya. Artinya, bila tanah gambut terlanjur terlalu lama dikeringkan, fungsi ekologisnya tak bisa pulih semisal, gambut tidak bisa lagi menyerap air.

Itulah sebabnya, kata Riswan, di masa datang perlu adanya penataan zona di Tripa. Pada lahan yang tak bisa pulih misalnya, bisa dikembangkan paludikultur yang sesuai dengan tanah gambut. Paludikultur dipandang sebagai praktik budidaya yang menerapkan ekonomi hijau. Untuk menjaga keberlanjutan paludikultur diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut, baik di areal penggunaan lain, lahan milik, maupun kawasan hutan.

Riswan menuturkan bahwa paludikultur sebagai salah satu upaya budidaya ramah lingkungan di lahan gambut. Paludikultur diyakini mampu mengembalikan kondisi biofisik, fungsi ekologis, dan nilai ekonomi ekosistem gambut. “Contohnya, budidaya jenis tumbuhan yang cocok di lahan gambut, seperti sagu atau nipah,” ungkap Riswan.

Yayasan Ekosistem Lestari bersama TFCA Sumatera telah merehabilitasi bekas lahan Kalista Alam dengan menanam 120.000 bibit pohon rawa. Karena telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, diperlukan intervensi dan rencana pengelolaan jangka panjang untuk memastikan pemulihan ekosistem dan jasa lingkungan Tripa secara berkelanjutan.

Ikhtiar YEL bersama TFCA Sumatera membuktikan konservasi di wilayah



Yayasan Ekosistem Lestari mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi dan berkampanye tentang konservasi rawa Tripa. Bersama Rawa Tripa Institute, YEL rutin menggelar forum diskusi di sekitar Tripa (kiri). Media informasi juga diberikan di masjid-masjid kala salat Jumat (atas). Kampanye dengan materi lingkungan pernah dilakukan dengan mengundang para khatib.

yang terlanjur dijamah perkebunan sawit memang tidak mudah. Konservasi tidak bisa hanya berhenti pada tercapainya penetapan kawasan lindung, namun juga melibatkan aspek lain: pemberdayaan, penyadartahuan, dan pemulihan ekosistem. Seluruh upaya itu untuk memastikan keberlanjutan konservasi Rawa Tripa di masa kini dan masa datang.

“Kita harus jujur bahwa kita harus lebih keras berusaha. Kita menebang pohon hanya perlu setengah jam, tapi agar tidak ditebang, kita harus menjaganya 24 jam seminggu. Jadi konservasi memang dalam posisi yang sulit, sangat sulit,” ungkap Graham.

Betapa pun tak mudah, Graham mengingatkan arus balik sedang terjadi di Tripa. Meski hanya 11.000 hektare, sekitar seperenam dari ekosistem gambut, Kawasan Lindung Gambut Tripa menandai titik balik perjuangan konservasi. “Sekarang pada posisi tidak bisa lagi mundur, tetap harus ada yang diselamatkan di Tripa.”

Penetapan Kawasan Lindung Gambut baru awal dari langkah panjang penyelamatan Rawa Tripa. Setelah melewati masa-masa pergulatan hukum, kini sebagian eksponen masyarakat setempat turut-serta memantau dan menjaga Rawa Tripa. ***



SENYUM CERIA

Seusai mengikuti pendidikan lingkungan, siswi-siswi ini menyempatkan diri bermain di halaman sekolah. Bersama generasi sebayanya, kelestarian rawa Tripa berada di pundak mereka kelak.



BAHAN BACAAN

Anonim. 2012. *Survei Sosial Ekonomi untuk Masyarakat di Kawasan Rawa Tripa*. Koalisi NGO HAM ACEH.

Farhan, F. dan L. Bakker. 2014. *Fragmentasi Institusi Atau Kolaborasi? Sebuah Pelajaran dari Tripa, Aceh*. Dalam: Laurens Bakker & Yanti Fristikawati (Ed). *Permasalahan Kehutanan di Indonesia dan Kaitannya dengan Perubahan Iklim serta REDD+*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Handian Purwawangsa dan Adi Hadianto. *Jasa Ekosistem dan Isu Sosial Budaya*. <http://cs.unsyiah.ac.id/tpsf/images/pdf/04-Ecosystem-Service-and-Social-Culture-Issues.pdf>. Diunduh pada Juni 2016.

Nowak, M G. 2015. *Laporan Survei Lapang Rawa Gambut Tripa (Kabupaten Aceh Barat Daya Dan Nagan Raya, Aceh, Indonesia)*. Yayasan Ekosistem Lestari, Paneco Foundation, TFCA Sumatera, SOCP.

Wich, S., Riswan, J. Jenson, J. Refisch, Dan C. Nellemann (Ed). 2011. *Orangutan dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Lestari di Sumatera. 2011*. Alih Bahasa: Gunung Gea. UNEP/GRASP/Paneco/YEL/ICRAF/Grid-Arendal.

Arsip:

- *Kemenangan Kecil di Rawa Tripa*. Catatan Teuku Muhammad Zulfikar.
- *Kilas Balik Advokasi Rawa Tripa*. Arsip Irsadi Aristora, Juru bicara TKPRT & For-Trust, Transparency International Indonesia.
- Arsip Laporan-laporan Kegiatan Yayasan Ekosistem Lestari.

Sebelum heboh kasus kebakaran lahan 2015 yang menyeret 15 perusahaan sawit di Riau, Rawa Tripa telah mengguncang penegakan hukum di Indonesia. Selama kurun 2011 -2012, para aktivis lingkungan Aceh menggaungkan aksi konservasi bagi ekosistem gambut Tripa.

Pada 2011, aktivis lingkungan Aceh melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatannya: menuntut gubernur Aceh mencabut izin usaha perkebunan PT Kalista Alam. Kasus yang lain, yang relevan dengan kasus Riau 2015, adalah pembakaran lahan oleh Kalista Alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut perusahaan itu atas tindakan membakar lahan. Kalista dinyatakan bersalah, dan didenda Rp 336 miliar.

Perjuangan hukum tersebut berantai, yang menyangkut satu perusahaan, Kalista Alam, dengan dua kasus. Pertama, kasus izin usaha perkebunan; dan kedua pembakaran lahan. Kendati melewati jalan berliku di pengadilan, hasil akhir kedua kasus melegakan: hukum berpihak kepada lingkungan dan konservasi.

Di luar persidangan hukum, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dan TFCA Sumatera melakukan berbagai upaya pelestarian di Rawa Tripa. Saat sengketa hukum di titik didih, dan konflik sosial masih menghangat, tim peneliti YEL memberanikan diri menyisir sudut-sudut Tripa untuk mengambil sampel gambut. Hasilnya: Tripa memendam tiga kubah gambut sedalam 8 meter lebih. Ini membungkam debat kusir tanpa dasar ilmiah, dan semakin menegaskan nilai penting Tripa dalam menjaga ekosistem gambut di pesisir barat Aceh.

Upaya lain yang menentukan nasib pelestarian Tripa di masa datang adalah rehabilitasi lahan gambut bekas kebun sawit Kalista Alam. Segera setelah izin Kalista dicabut, YEL berscepat membendung kanal-kanal. Permukaan air gambut naik, vegetasi rawa pun perlahan memulihkan diri.

Hingga kini, setelah riuh-rendah kasus hukum, YEL bersama masyarakat sekitar tetap mengawal perlindungan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa. Untuk memperkuat pengelolaan kawasan lindung itu, YEL bersama TFCA Sumatera menggelar pemantauan bersama warga, kampanye penyadaran, dan menggulirkan ekonomi alternatif di sekitar Tripa.



TFCA Sumatera

Administrator : Yayasan Keaneekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

Jl. Bangka VIII No.38 Pela Mampang

Jakarta 12720 - INDONESIA

Tel: +(62-21) 7199953; 719 9962

Fax: +(62-21) 719 6530

twitter: @tfcasumatera

e-mail: tfcasumatera@tfcasumatera.org

www.tfcasumatera.org

